

**KONFLIK SOSIAL PADA MASYARAKAT MELAYU PATANI DI
THAILAND SELATAN**



Skripsi

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
Guna memperoleh gelar sarjana**

Oleh :

**Naslan Wadeng
NPM : 1331040017**

Program studi :Pemikiran Politik Islam

**FAKULTAS USULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H/2018 M**

ABSTRAK
KONFLIK SOSIAL PADA MASYARAKAT MELAYU PATANI DI
THAILAND SELATAN

Oleh:
NaslanWadeng

Upaya-upaya modernisasi dan pembaruan-pembaruan administrative untuk menyatukan negara yang telah dimulai di bawah raja-raja yang terdahulu kehilangan momentumnya. Negara kembali terancam desintegrasi sebagai akibat adanya konflik-konflik kekuasaan di pusat dan persaingan etnis di daedah-daerah. Dan pada waktu itu juga pemerintahan mengupayakan asimilasi kebudayaan melayu Patani hingga menjadi kebayaan melayu Patani berkurang. Maka etnis Melayu mempertahankan indentitas mereka dengan berbagai cara sehingga ada perlawanan etnis Melayu dengan pemerintah Thailand dalam mempertahankan indentitas mereka

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Latar belakang dan Penyelesaian konflik sosial pada masyarakat Melayu Patani di Thailand Selatan, dalam aspek sosial politik, ekonomi, budaya, dan agama. Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data dengan melakukan Obvervasi, Wawancara, dan Dokumentasi melalui responden mahasiswa 15 orang, guru-guru 5 orang, dan pemerintahan lokal 5 orang. Kesemua objek penelitian ini merupakan masyarakat Melayu Patani dan wakil dari pemerintahan local kemudian data-data yang berhasil dikumpulkan, lalu di analisa dengan metode analisa kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa, konflik sosial pada Masyarakat Melayu Patani di Thailand Selatan dilator belakang di antara lain sebagai berikut: 1. Kehilangan kekuasaan kerajaan Islam Mealayu Patani dan kehilangan system kerajaan Melayu Patani yang menjadi bagian dari pemerintahan Thailand; 2. Dalam bidang ekonomi terjadi ketidakadilan dalam pembagian hasil bumi demi kesejahteraan masyarakat Melayu Patani; 3. Dalam bidang budaya, tidak member ruang dan kesempatan untuk berkembangnya keragaman, bahasa Melayu, dan kehidupan sosial keagamaan dengan system asimilasi sejak pemerintah pardana menteri Thailand .Ketiga factor tersebut merupakan latar belakang utama menjadi konflik Thailand selatan.Adapun Penyelesaian/solusi konflik sosial di Thailand Selatan adalah sebagai berikut:1. Pemerintahan Thailand member hak memerintah Wilayah bagi orang MelayuPatani, kerajaan Thailand yang ke-5 memberi hak bagi orang Melayu memerintah Wilayah-wilayah yang di bagi oleh pemerintahan Thailand, dengan kekuasaan terbatas; 2. Membuka kesempatan untuk perkerjaan, semua pejabat-pejabat di gaji oleh pemerintahan Thailand, dari penjabat wilayah hinggake Imam masjid;3. Memberi kebebasan dalam berbudaya dari sekolah tingkat dasar sampai perguruan tinggi untuk mempelajari dan mengembangkan budaya dan bahasa Melayu, serta kehidupan soial keagamaan Islam.



**KEMENTERIAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 704030

PERSETUJUAN

Nama : Naslan Wadeng
NPM : 1331040017
Jurusan : Pemikiran Politik Islam
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama
Judul Skripsi : **KONFLIK SOSIAL PADA MASYARAKAT MELAYU
PATANI DI THAILAND SELATAN**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah

Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Effendi M. Hum
NIP. 195807211986031004

Tin Amalia Fitri, M.S.i
NIP. 19780130211012004

Mengetahui
Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam

Dr. Nadirsah Hawari, MA
NIP. 197406282008011013



KEMENTERIAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 704030

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **KONFLIK SOSIAL PADA MASYARAKAT MELAYU PATANI DI THAILAND SELATAN**, disusun oleh : **Naslan Wadeng**, NPM : **1331040017**, Jurusan : **Pemikiran Politik Islam** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, pada hari/tanggal : **Rabu, 02 Mei 2018**.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Sudarman, M.Ag

Sekretaris : Dr. Kiki Muhammad Hakiki, M.A

Penguji I : Dr. Ali Abdul Wahid, M.Si.

Penguji II : Drs. Effendi, M.Hum

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama

Dr. Arsyad Sobby Kesuma, Lc. M.Ag.
NIP. 195808231993031001

MOTTO

❦ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦١﴾

Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. ^{1*} (QS Al Anfal : 61)

يَنْفَالُوا عَدَاءَ كُنْتُمْ إِذْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ نِعْمَتًا وَادْكُرُوا تَفَرَّقُوا وَلَا جَمِيعًا اللَّهُ يَجْبِلُ وَأَعْتَصِمُوا
كَذَلِكَ مِنْهَا فَأَنْقَذَكُمْ النَّارِ مَنْ حُفِرَ شَفَاعَةً عَلَى وَكُنْتُمْ إِخْوَانًا بِنِعْمَتِهِ فَأَصْبَحْتُمْ قُلُوبَكُمْ بِ
يَهْتَدُونَ لَعَلَّكُمْ أَيْتِهِ لَكُمْ اللَّهُ يَبِينُ ﴿٦٢﴾

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. ^{2**} (QS Ali Imran : 103)

^{1*} Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, (bandung, 2016), h.696.

^{2**} *Ibid*, h.249.

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang selalu terselesaikannya karya ini, di antaranya:

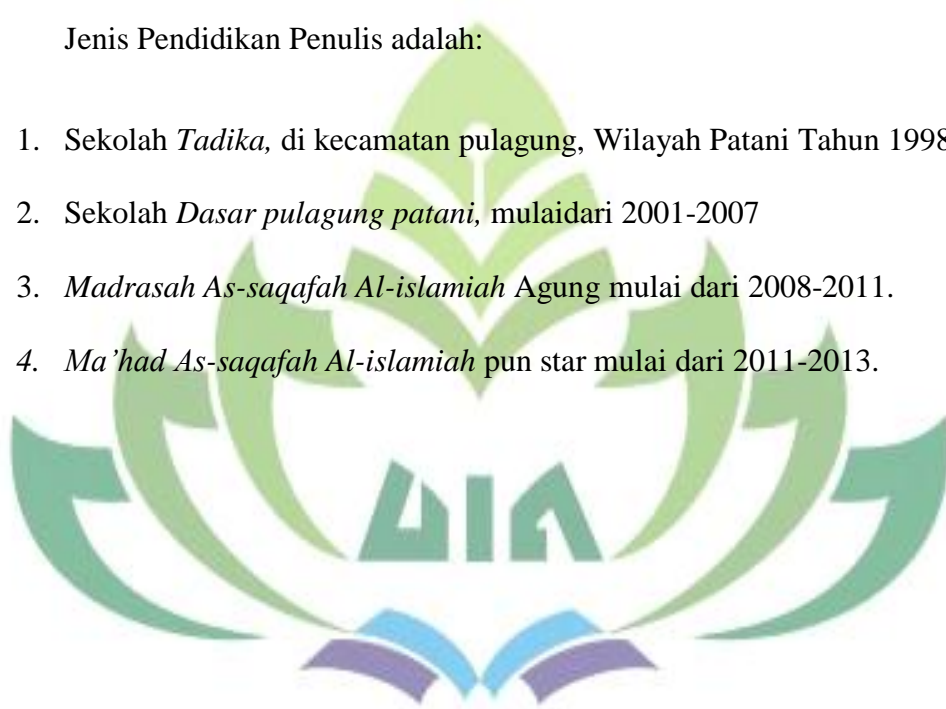
1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Samsyuddin yang selalu memberikan motivasi yang sangat besar untuk menggapai keberhasilanku dan dengan sabar melimpahi aku dengan do'a dan kasih sayang.
2. Bapak dan ibu Dosen yang telah mendidik dan memberika nbimbingan dan menyelesaikan perkuliahan dan skripsi.
3. Kepada teman-temanku di jurusan PPI angkatan 2013, yang selalu memberikan keceriaan dan semangat untuk meraih kesuksesan.
4. Sahabat-sahabat tercinta dari Persatuan Mahasiswa Melayu Patani di Indonesia (PMMPI), yang selalu memberikan semangat dan terima kasih atas setiap jasa baik kalian.
5. Yang kubanggakan almamater tercinta, UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Naslan bin Samsyuddin, dilahirkan di Patani Thailand, pada Tanggal 23 November 1994, anak yang pertama dari tiga saudara, dari pasangan Bapak Samsyuddin dan Mashitoh.

Jenis Pendidikan Penulis adalah:

1. Sekolah *Tadika*, di kecamatan pulagung, Wilayah Patani Tahun 1998.
2. Sekolah *Dasar pulagung patani*, mulaidari 2001-2007
3. *Madrasah As-saqafah Al-islamiah* Agung mulai dari 2008-2011.
4. *Ma'had As-saqafah Al-islamiah* pun star mulai dari 2011-2013.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga kripsi yang berjudul “konflik sosial pada Masyarakat Melayu Patani Di Thailand Selatan” dapat di selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam di sampaikan kepada nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikutnya yang setia.

Skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi program strata satu (S-1), pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung, guna memperoleh gelar Sarjana Ushuluddin dan Studi dalam jurusan Pemikiran Politik Islam. Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini taklupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukti, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Dr. H. ArsyadSobby Kesuma, Lc., M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama serta para Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung;
3. Dr. Nadirsah Hawari, MA selaku ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam dan IbuTin Amalia Fitri, M.Si. selaku sekretaris jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung;

4. Drs. Effendi M. Hum, selaku pembimbing I, dan Tin Amalia Fitri,M.Si. selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunnya skripsi ini;
5. Para dosen serta para staf karyawan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu peneliti selama mengikuti Perkuliahan;
6. Bapak, Ibu, dan Adik serta teman-teman dekat, yang senantiasa mendo'akan, membantu, serta memberikan dukungan dalam upaya menyelesaikan skripsi ini;
7. Sahabat-sahabat mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Angkatan 2013.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian dan tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal itu, tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Demikian yang penulis dapat sampaikan diharapkan betapapun kecilnya karya tulis (hasil penelitian) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 24 Februari 2018
Peneliti,

Naslan Wadeng
NPM:1331040017



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I. PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	2
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
F. Tinjauan Pustaka	6
G. Metode Penelitian.....	7

BAB II. MENGENAL BERAGAM KONFLIK SOSIAL DAN PENYELESAINYA

A. Konflik Sosial	12
a. Pengertian Konflik Sosial	12
b. Macam-macam Konflik	14
c. Faktor Penyebab Konflik	17
B. Solusi/ Penyelesaian Konflik Sosial.....	24
1. Pengertian Pnyelesaian konflik sosial	24
2. macam-macam penyelesaian konflik sosial	25

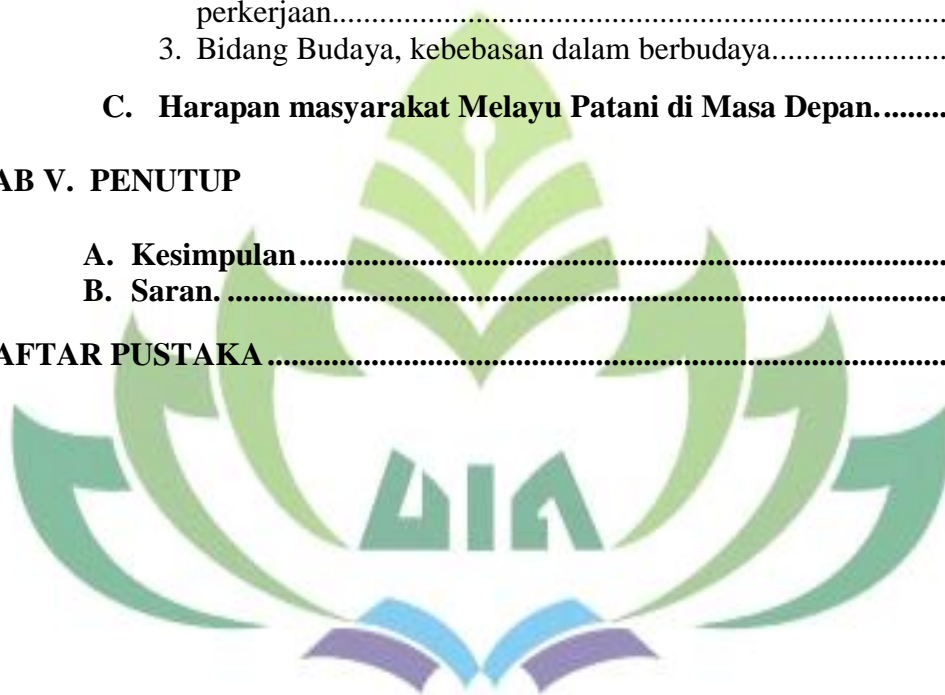
BAB III. GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

A. Geografi Patani.....	32
B. Demografi Patani	34
C. Sekilas Sejarah Kerajaan Islam Melayu Patani.....	54
D. Sekilas Sejarah Konflik Soaial di Thailand Selatan	58

BAB IV. ANALISA LATAR BELAKANG KONFLIK DAN PENYELESAIANNYA

A. Latar belakang konflik.....	65
1. Konflik bidang politik, Kehilangan kekuasaan kerajaan Islam Mealayu Patani.....	68

2. Konflik bidang ekonomi, Ketidak keadilan dalam pembagian hasil bumi.	72
3. Konflik bidang budaya, Tidak memberi keruangan keragaman.	74
B. Penyelesaian/Solusi.....	77
1. Bidang politik, Pemerintahan Thailand memberi hakmemerintah Wilayah bagi Orang Melayu Patani.....	79
2. Bidang ekonomi, membuka kesempatan untuk perkerjaan.....	83
3. Bidang Budaya, kebebasan dalam berbudaya.....	85
C. Harapan masyarakat Melayu Patani di Masa Depan.....	87
 BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.	89
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami skripsi ini, maka secara singkat terlebih dahulu penulis akan menguraikan dan menjelaskan istilah-istilah dari judul skripsi “**Konflik Sosial pada Masyarakat Melayu Patani di Thailand Selatan**”

Konflik Sosial dapat diartikan sebagai pertentangan kepentingan oleh pihak yang berbeda,³ yaitu merupakan Konflik antara etnis Melayu Patani dengan Pemerintahan Thailand

Masyarakat Melayu Patani adalah Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sama-sama ditaati dalam lingkungannya.⁴ yang tinggal di Patani. Patani adalah patani yang dimaksudkan dalam buku ini bukanlah Wilayah atau “Changwad pattani” sebagaimana yang wujud dalam peta negara Thai (Thailand) sekarang tetapi adalah merujuk kepada sebuah negeri yang sepandannya adalah lebih luas; iaitu meliputi Wilayah-wilayah Narathiwat, Yala dan sebahagian dari songkhla (daerah-daerah sebayor dan tabor).⁵ Yaitu Masyarakat yang kebangsaan melayu patani yang tinggal di Thailand Selatan sekarang.

Thailand Selatan adalah merupakan sejumlah kawasan di Thailand yang berbatasan dengan Semenanjung Malaysia. Tempat ini terdiri dari 14 wilayah

³ Rusdiana, M.M. “*Manajemen Konflik*” (CV Pustaka Setia 2015) h. 129

⁴ Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, (PT Asdi Mahasatya, Jakarta, 2009), h. 96-97.

⁵ Ahmad Fathy Al-Fatani *pengantar sejarah patani*, (Pustaka Darussalam 1994), h. 3

yang diantaranya adalah Wilayah Narathiwat, Wilayah Pattani, Wilayah Yala, Wilayah Songkhla dan Wilayah Satun. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu dan beragama Islam meskipun Thailand diperintah oleh kerajaan Buddha.⁶ Yaitu Wilayah-wilayah yang kebangsaan Melayu Patani

Berdasarkan Penjelasan istilah-istilah judul di atas maka definisi judul "*Konflik Sosial pada Masyarakat Melayu Patani di Thailand Selatan*" adalah tentang latar belakang dan penyelesaian konflik sosial yang terjadi antara Pemerintahan Thailand dan etnis Melayu Patani.

B. Alasan Memilih judul

Ada beberapa alasan mengapa penulis tertarik dan memilih judul ini:

1. Alasan objektif

Penulis ingin mengetahui mengapa konflik sosial antara Masyarakat Melayu patani dengan Pemerintahan Thailand sampai saat ini masih terjadi meskipun konflik sudah terjadi cukup lama.

2. Alasan subyektif

Judul yang diangkat ada relevansinya dengan jurusan penulis yaitu Pemikiran Politik Islam.

C. Latar belakang Masalah

Setiap masyarakat memiliki perbedaan di berbagai bidang, baik di segi pemikiran dan pendapat, terutama bagi masyarakat demokrasi, yang sangat menghargai perbedaan sebagai landasan utama. Oleh karena itu harus memahami,

⁶https://id.wikipedia.org/wiki/Thailand_Selatan. Diakses, jam 23:38 tanggal 13 November 2017.

dan menerima antara satu sama lain, baik di segi pemikiran, agama, budaya, dan kepercayaan.

Masyarakat Melayu di tiga provinsi Selatan Thai (dikenali juga sebagai masyarakat Melayu Patani) merupakan salah satu kelompok minoritas di negara Thai, tetapi merupakan kelompok mayoritas di tiga wilayah selatan Thai. Mereka ini merupakan orang Melayu dari segi kebudayaan, adat istiadat dan juga rupa paras.⁷

Sejak tahun 1785 M Patani terkenal dengan bumi jajahan Thailand, dan diresmikan pada tahun 1902 M sebagai bagian dari Negara Thailand, selama 117 tahun (1785-1902) Thailand menggunakan berbagai politik atau cara untuk melemahkan Negara Patani, menurut Organisasi Human Rights Watch, selama kurun waktu itu banyak warga muslim yang diculik disiksa dan dibunuh tanpa alasan, selama berpuluh-puluh dekaderakyat Patani berada didalam tekanan/tindasan Thailand, dan tidak memiliki kebebasan untuk mengamalkan budaya, Agama dan sebagainya.

Tekanan dan penindasan itu mendorong rakyat Patani berusaha keras untuk melepaskan diri dari jajahan Thailand yang selama ini merenggut kemerdekaan mereka. Tujuan utama rakyat Patani adalah untuk mempertahankan wilayah atau daerah mereka yang telah dikuasai oleh kerajaan Thailand selama berabad-abad lamanya, sekaligus untuk mempertahankan nilai-nilai Agama,

⁷“Bahasa Melayu Patani di Tiga Wilayah Selatan Thai”
<http://ummahpatani.blogspot.co.id/2010/10/bahasa-melayu-patani-di-tiga-wilayah.html>. Diakses tanggal 11-05-2017 waktu 00:57.

budaya dan nilai-nilai keislaman yang selama ini mereka anut. Rakyat Patani menjadikan perjuangan mereka sebagai jihad karena jihad merupakan kewajiban bagi umat Islam apalagi terhadap kepentingan agama.

Sejak 1906, sesuai dengan perjanjian Inggris-Siam, Thailand secara resmi mengambil alih negara-negara di Melayu Utara: Pattani, Narathiwat, Songkhla, Satun dan Yala, yang kemudian menjadi provinsi di Thailand. Sementara Negara di Melayu utara yang lain: Kedah, Kelantan, Perlis dan Terengganu oleh Inggris dimasukkan sebagai bagian dari Malaysia.

Sejak penyatuan kelima Negara di wilayah Melayu Utara ke dalam bagian dari Thailand, terjadi benturan budaya antara Muslim Melayu dan Budhis Thailand. Pada awal pemerintahan Thailand yang dikuasai oleh tentara Jenderal Luang Pibunsongkram, (1938-1944) Marshal Sarit Thanarat, (1958-1963) dan para Jenderal lainnya, kebijakan nasionalisme budaya Thailand menjadi kebijakan utama. Thaisasi upaya penggunaan budaya dan bahasa Thai secara kuat di seluruh Thailand, termasuk Wilayah Selatan, membuat benturan budaya yang keras, yang menimbulkan resistensi sangat kuat bagi Muslim Melayu di Thailand Selatan. Dua peristiwa yang mengesankan pada tahun 2004 sangat menarik perhatian semua pihak baik di Thailand maupun di luar Thailand.

Upaya-upaya modernisasi dan pembaruan-pembaruan administratif untuk menyatukan negara yang telah dimulai di bawah raja-raja yang terdahulu kehilangan momentumnya. Negara kembali terancam disintegrasi sebagai akibat adanya konflik-konflik kekuasaan di pusat dan persaingan etnis di daerah-

daerah.⁸ Dan pada waktu itu juga pemerintah mengupayakan asimilasi kebudayaan melayu patani hingga menjadi kebayaan melayupatani berkurang. Maka etnis melayu mempertahankan identitas mereka dengan berbagai cara sehingga ada perlawanan itnis melayu dengan pemerintah Thailand dalam mempertahankan identitas mereka

Maka sampai sekarang perlawanan etnis melayu patani terhadap pemerintahan Thailand masih terus terjadi, menyebabkan kondisi tidak aman dalam aktivitas keseharian masyarakat Melayu Patani di Thailand Selatan. Setiap terjadi konflik senjata antara tentera dan masyarakat Melayu Patani di Thailand Selatan, yang terjadi kurban dalam masyarakat. Tidak selesainya konflik antara masyarakat Melayu Patani dengan pemerintahan Thailand sampai saat ini, yang melatar belakangi dilakukan penelitian ini.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut di atas sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Latar belakang konflik Sosial pada Masyarakat Melayu Patani di Thailand Selatan?
2. Bagaiamanakah penyelesaian konflik Sosial pada Masyarakat Melayu Patani di Thailand Selatan

⁸ Surin Pitsuwan, *Islam di muangthai Nasionalisme Melayu Masyarakat*, jakarta 1989, h.68.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, antara lain :

1. Untuk mengetahui apakah Latar belakang konflik sosial pada Masyarakat Melayu Patani di Thailand Selatan.
2. Untuk bagaimanakah penyelesaian konflik sosial pada Masyarakat Melayu Patani di Thailand Selatan.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis hasil dari penelitian ini untuk menambah khazanah keilmuan terkait bidang Politik khususnya tentang penyelesaian konflik.
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya mencari solusi yang terbaik guna mengatasi konflik politik yang terjadi di wilayah Thailand Selatan.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dilakukan, idealnya agar peneliti mengetahui hal-hal apa yang telah diteliti dan belum diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian. Ada beberapa hasil penelitian yang peneliti temukan, terkait dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN PERDANA MENTERI THAKSIN SHINAWATRA DALAM MEYELESAIKAN KONFLIK MINORITAS MUSLIM DI THAILAND SELATAN” yang ditulis oleh Muhammad Fikri Sama-ae, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, universitas muhammadiyah Jakarta 2006. Skripsi ini menfokuskan kajiannya terhadap kebijakan

Pemerintahan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra dalam upaya penyelesaian konflik di Thailand Selatan, penelitian ini yang sama tentang konflik di Thailand Selatan maka yang berbedanya Kebijakan Pemerintahan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra.

2. Skripsi yang berjudul “ KONFLIK ANTARA MASYARAKAT DENGAN PEMERINTAH (STUDI KASUS PADA EKSPLORASI TAMBANG DI KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA NUSA TENGGARA BARAT) yang ditulis oleh Sahlan Fakutas Ilmu sosial dan Politik, Universitas Hasanuddin Makassar 2015 . Skripsi ini menfokuskan kajiannya Eksplorasi tamban, penelitian ini yang sama tentang konflik maka yang berbedanya Pada Eksplorasi Tambang Di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat.

Penelitian diatas berbeda dengan apa yang sedang penulis teliti saat ini dalam hal ini berfokuskan kaliannya latar belakang dan penyelesaian konflik sosial pada masyarakat Melayu Patani.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu “suatu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden”.⁹ Penelitian ini merujuk kepada masyarakat Melayu patani. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang

⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset sosial*, (Bandung :Mandur Maju, cet VIII, 1996), h.102.

berhubungan dengan konflik sosial pada masyarakat melayu patani di Thailand Selatan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara objektif dari objek penelitian.¹⁰ Secara sederhana dapat dikatakan bahwa deskriptif eksploratif riset yang mengklarifikasikan data yang bersifat kualitatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk menerangkan dan menggambarkan objek latar belakang dan penyelesaian konflik .

H. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data yang diperoleh dari sumber utama penelitian, yaitu hasil wawancara dengan responden, sumber data primer penelitian adalah Masyarakat Melayu Patani yang paham tentang konflik antara Masyarakat melayu Patani dan pemerintah Thailand yaitu Mahasiswa Patani 15 orang, Guru-guru 5 orang, dan bagian dari pemerintah yaitu pemerintahan lokal 5 orang, dan penelitian menggunakan teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila obyek yang akan diteliti atau sumber data sangat banyak luas, misal penduduk dari suatu Negara, propinsi atau kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan

¹⁰*Ibid, hlm. 105*

sumbar data, maka pengambil sampelnya berdasarkan daerah popilasi yang telah ditetapkan.¹¹

b. Data sekunder

Data sekunder penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan Konflik Sosial.

I. Metode pengumpulan data

1. Metode interview

Percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹² Metode ini dilakukan sebagai metode utama untuk mengumpulkan informasi mengenai konflik sosial pada Masyarakat Melayu Patani. Peneliti menggunakan Model wawancara tidak langsung misalnya melalui telepon, chatting, dan email (wawancara tertulis).¹³

2. Metode observasi

Pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur - unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala pada objek penelitian. Unsur unsur yang tampak itu disebut data atau informasi yang harus diamati dan

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Alfabeta, Bandung, 2015), h.121

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, Remaja karya (Bandung: 1989), Cet. 1. h. 148

¹³ Vafi Saefulah, Teknik Wawancara Jurnalistik, https://www.kompasiana.com/www.vefisaefullah.com/teknik-wawancara-jurnalistik_5528db7bf17e61590d8b4681. Diakses, 22 Februari 2018.

dicatat secara benar dan lengkap.¹⁴Metode ini untuk memperoleh data dan mencatat mengenai konflik sosial pada Masyarakat Melayu Patani di Thailand Selatan. Metode ini juga dapat bermanfaat untuk menjelaskan data yang objektif dari data yang dikemukakan oleh para responden melalui interview, dengan demikian data yang diperoleh benar merupakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah”pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip juga termasuk buku-buku tentang pendapat , teori, dalil atau hukum - hukum dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah penyelidikan”.¹⁵Metode dokumentasi dijadikan sebagai metode pelengkap.Data yang digali adalah data yang berkenaan dengan konflik sosial pada masyarakat melayu patani.

J. Metode analisis data

Data yang diperoleh di lapangan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu :”Digambarkan dengan kata kata atau kalimat, dipisahkan menurut kategori untuk diambil suatu kesimpulan .”Dalam menarik kesimpulan akhir penulis menggunakan metode berfikir induktif.Berfikir induktif yaitu “berangkat dari fakta fakta yang khusus, peristiwa - peristiwa yang konkrit” kemudian ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.

¹⁴Hadari Nawawi,*Instrumen Penelitian Sosial*, (Yogyakarta, Gajah Mada University 1995), h. 74.

¹⁵Hadari Nawawi,*Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Jakarta: Gajah Mada University press,1998) ,h.133.

Teknik analisis yang digunakan deskriptif analisis, mencari gambaran yang sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan konflik sosial pada Masyarakat Melayu Patani di Thailand Selatan.



BAB II

MENGENAL BERAGAM KONFLIK SOSIAL DAN SOLUSINYA

A. Konflik Sosial

1. Pengertian Konflik Sosial

Pengalaman umum, yang diperkuat oleh kesaksian sejarah

menunjukkan bahwa relasi sosial yang ditandai dengan kompetisi yang tidak terkendali dapat berkembang menjadi penentangan dan jika penentangan ini menegang tajam akan memunculkan konflik. Kata konflik berasal dari bahasa Latin, *confligere*, yang berarti pertarungan. Dalam pengertian sosiologis, konflik dapat dipahami sebagai suatu “proses sosial” di mana dua orang atau dua kelompok orang berusaha menyinkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya.¹⁶

Istilah “konflik” secara etimologis berasal dari bahasa Latin *con* yang berarti bersama dan *fligere* yang berarti benturan atau tabrakan. Di sisi, “konflik” dalam kehidupan sosial berarti benturan kepentingan, keinginan, pendapat, dan lain-lain yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih. Di sisi lain, William Chang meragukan bahwa akar konflik ada pada ketidakpuasan batin, kecemburuan, iri hati, kebencian, masalah perut, masalah tanah, masalah tempat tinggal, masalah pekerjaan, masalah uang dan masalah kekuasaan. Chang mengajukan pendapatnya bahwa selain unsur-unsur di atas, emosi manusia sesaat pun dapat memicu terjadinya konflik sosial.

¹⁶ Paisal Burlan, *patologi sosial*, Jakarta : Bumi Aksara, 2016, h.241-242

Dalm *International Encyclopaedia of The Social Sciences* Vol. 3(hlm. 236-241) diuraikan mengenai pengertian konflik dari aspek antropologi, yakni suatu gejala pertentangan yang ditimbulkan sebagai akibat dari persaingan antara paling tidak dua pihak; di mana tiap-tiap pihak dapat berupa perorangan, keluarga, kelompok kekerabatan, satu komunitas, atau mungkinsatu lapisan kelas sosialpendukung ideologi tertentu, satu organisasi politik, satu suku bangsa, atau satu pemeluk agama tertentu. Demikian pihak-pihak yang dapat terlibat dalam konflik meliputi banyak macam bentuk dan ukurannya.Selain itu, padat pula dipahami bahwa pengertian konflik secara antropologis tersebut tidak berdiri sendiri, malainkan secara bersama-sama dengan pengertian konflik menurut aspek-aspek lain yang semuanya itu turut ambil bagian dalam memunculkan konflik sosial dalam kehidupan kolektif manusia (Chang, 2001).¹⁷

Daniel Webster mendefinisikan konflik sebagai:

1. Persaingan atau pertentangan antara pihak-pihak yang tidak cocok satu sama lain.
2. Keadaan atau perilaku yang bertentangan (misalnya: pertentangan pendapat, kepentingan, atau pertentangan antarindividu).
3. Perselisihan akibat kebutuhan, dorongan, keinginan, atau tuntutan yang pertentangan.
4. Perseteruan.¹⁸

¹⁷ Elly M. Setiadi, Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik*,(Prenadamedia Group-Jakarta,2013), h.54

¹⁸ Deborah Hutauruk, Daniel P. Purba, Margaretha H. Eddy,*Kiat Mengenai Konflik*, Translation Copyright 2006, h. 1.

Konflik adalah segala bentuk interaksi yang bersifat oposisi atau suatu interaksi yang bersifat antagonis (berlawanan, bertentangan atau berseberangan).¹⁹

2. Macam-macam konflik

Mengelompokkan konflik, penyebab konflik, dan reaksi terhadap konflik kedalam kategori tertentu bukanlah pekerjaan yang mudah. Setelah mempelajari bab ini, anda dapat memahami kategori berikut ini: konflik diri, konflik antarindividu, konflik dalam kelompok dan konflik antarkelompok.

1. Konflik diri adalah gangguan emosi yang terjadi dalam diri seseorang karena dituntut menyelesaikan suatu pekerjaan atau memenuhi suatu harapan, sementara pengalaman, minat, tujuan, dan tata nilainya tidak sanggup memenuhinya. Hal ini menjadi beban baginya. Konflik ini pun bisa terjadi apabila mengalami, minat, tujuan, atau tata nilai pribadinya bertentangan satu sama lain. Konflik diri mencerminkan perbedaan antara apa yang anda katakan, inginkan, dan apa yang anda lakukan untuk mewujudkan keinginan itu. Konflik diri menghambat kehidupan sehari-hari dan bahkan dapat mengakibatkan orang kehilangan akal sehingga tidak tahu harus mengerjakan apa.

Pada tahap paling ringan, konflik diri menimbulkan pusing kepala dan nyeri punggung. Konflik diri dapat diatasi dengan teknik mengatasi stres yang dikenal sangat ampuh untuk mengatasi konflik jenis ini. Konflik tahap kedua ditandai oleh stres yang sudah “parah” kalau orang

¹⁹ Jacobus Ranjabar, *sistem sosial budaya indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2013, h.195.

punya pikiran lebih baik mati daripada hidup, ia sudah berada konflik diri tingkat ketiga.

2. Konflik antarindividu adalah konflik antara dua individu. Setiap orang mempunyai empat kebutuhan dasar psikologis yang bisa mencetuskan konflik bila tidak terpenuhi. Keempat kebutuhan dasar psikologis ini adalah keinginan untuk dihargai dan diperlakukan sebagai manusia, keinginan untuk memegang kendali, keinginan untuk memiliki harga diri yang tinggi, dan keinginan untuk konsisten.

➤ *Keinginan untuk dihargai dan diperlakukan sebagai manusia.* Kita semua menginginkan orang mengakui martabat kita, serta menghargai kita dan jerih payah yang kita berikan. Itulah sebabnya penghargaan merupakan alat motivasi yang ampuh. Kita senang sekali jika dipuji setelah menyelesaikan sesuatu pekerjaan dengan baik, dan dihargai atas sumbangan pikiran yang kita berikan. Bila kita merasa tidak dihargai atau dianggap dapat di perlakukan sekehendak hati orang lain, atau dapat dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain, ini berarti keinginan kita untuk dihargai telah di langgar. Pelanggaran itu memicu reaksi kita, berupa rasa takut atau amarah.

➤ *Keinginan untuk memegang kendali.* Memegang kendali adalah keinginan semua orang dan beberapa orang keinginan ini besa besar sekali. Orang yang memiliki keinginan yang sangat berlebihan untuk memegang kendali pada dasarnya tidak punya rasa percayadiri. Semakin besar rasa percaya

diri anda. Ingatlah hal ini selalu bila di masa datang anda berhadapan dengan orang yang selalu ingin mengendalikan segala sesuatu.

➤ *Keinginan untuk memiliki harga diri.* Rasa harga diri yang tinggi adalah landasan yang kokoh untuk menghadapi berbagai jenis situasi. Harga diri adalah kunci bagi kemampuan kita untuk memberi jawaban, bukan untuk reaksi. Memjawab suatu persoalan adalah pendekatan positif, terkendali, dan berorientasi memecahkan masalah. Reaksi adalah langkah negatif, dan sering kali tidak tepat, penuh emosi, dan tanpa pikir panjang. (Misalnya, pasien yang mengikuti perintah dokter vs. pasien yang rewel bila disuruh minum obat.)

➤ *Keinginan untuk konsisten.* Bila anda mengambil sikap tegas mengenai suatu masalah dan tidak mengubah pendirian anda lagi, akan salah. Keinginan untuk konsisten bersama dengan keinginan untuk benar demi menyelamatkan muka, menjadi faktor penting dalam setiap konflik.

3. Konflik dalam kelompok adalah konflik yang terjadi antara individu dalam suatu kelompok (tim, departemen, perusahaan, dsb.), sedangkan konflik antarkelompok melibatkan lebih dari satu kelompok (beberapa tim, departemen, organisasi, dsb.). Aspek kelompok menambah kerumitan konflik. Setiap orang tidak hanya harus mengatasi konflik dalam dirinya dan konflik antara dia dengan orang lain, tetapi juga harus berhadapan dengan keseluruhan interaksi dengan semua pelaku yang terlibat. Konflik antarkelompok sering kali terus berjalan sendiri dan persoalan tambah

besar karena politik, desas-desus, dan hasutan. Persoalan yang bertambah banyak ini menciptakan lapisan kerumitan baru bagi setiap konflik.

4. Konflik antarkelompok adalah yang paling rumit dan serius bagi perusahaan. Setiap kali konflik bertambah panas dan menyebarkan di antara kelompok, desas-desus dan gunjingan akan membawa kekacauan yang akhirnya merusak anda dan perusahaan.²⁰

3. Faktor penyebab konflik

Faktor penyebab konflik adalah teori konflik sosial berkesenimbangan (*protected social conflict/PSC*). Teori ini dikembangkan oleh Edward Azar (1990) yang merujuk kepada kondisi-kondisi tertentu yang mendorong timbulnya permusuhan antar kelompok komunal berupa kebencian rasial, etnik, kultur atau agama yang berlangsung lama dan seringkali mencuat dalam bentuk aksi-aksi kekerasan aparatis.²¹

Menurut Azar ada empat variabel yang menjadi pra-kondisi timbulnya konflik sosial yang berkepanjangan (*Protected social conflict / PSC*), yakni : (1) muatan komunal (*Communal content*), (2) kebutuhan dasar manusia (*Human Needs*), (3) peran negara/pemerintah (*Governance and the states' Role*), (4) keterkaitan internasional (*International Linkages*). Masing-masing faktor di atas dapat dijelaskan secara berikut:

²⁰ Deborah Hutauruk, Daniel P. Purba, Margaretha H. Eddy, *Kiat Mengenai Konflik*, Translation Copyright 2006, h.12-17.

²¹ Henry Iwansyah, *Segregasi Sosial dan Relevansinya dengan Konflik Komunal Berbasis Sara* (Lampung: Percetakan Osa, 2013), h. 13.

1. Muatan komunal (*Communal Content*)

Muatan komunal, menurut Azar, merupakan faktor yang paling dominan dalam mendorong munculnya konflik sosial yang berkepanjangan. Ia menegaskan bahwa elemen yang paling signifikan dari faktor-faktor yang pengaruh kepada pembentukan PSC adalah masyarakat yang memiliki komposisi 'multi-komunal'

Masyarakat multi-komunal, baik yang terbentuk sebagai hasil dari kebijakan kolonial atau kompetisi historis, sering mengakibatkan dominasi satu atau gabungan kelompok komunal yang tidak baik responsif terhadap kelompok komunal yang lain. Kondisi semacam ini dapat menghambat proses pembangunan, bangsa, merusak tatanan sosial dan akhirnya melahirkan fragmentasi dan konflik sosial yang berlarut-larut solusi untuk mendamaikan konflik macam ini menurut Azar, adalah dengan menegalkan intergrasi atau kerja sama sosial.²²

2. Kebutuhan Dasar Manusia (*Human Needs*)

Kebutuhan Dasar manusia (*Human Needs*) merupakan variabel kedua yang dapat mengubah kondisi-kondisi yang semula tidak berpotensi konflik. Kebutuhan ontologis yang paling jelas individu atau kelompok adalah kelangsungan hidup yang bergantung pada kepuasan atas kebutuhan –kebutuhan dasar. Dalam kelangkaan dunia fisik, kebutuhan dasar ini jarang terbagi secara adil atau merata. Sementara satu kelompok/individu dapat menikmati kebutuhan tersebut secara

²²*Ibid.* h. 22.

berlimpah, kelompok/individu yang lainnya justru sebaliknya. Keluhan akibat kekurangan kebutuhan biasanya diekspresikan secara kolektif. Kegagalan pihak berwenang dalam merespons keluhan tersebut menimbulkan ceruk konflik sosial yang berlarut-larut.

Azar juga mengingatkan bahwa kebutuhan pembangunan tidak selalu harus berupa fisik dan juga tidak terpenuhi kebutuhan materi tersebut tidak selalu mengarah langsung ke konflik. Kuncinya adalah sejauh mana kelompok minoritas mengakses pasar atau lembaga politik atau memperoleh pengakuan eksistensi komunal.

3. Peran pemerintah dan negara

Peran pemerintah dan negara merupakan variabel, yang menurut Azar, dapat menimbulkan konflik yang berpanjangan. Salah satu peran negara, demikian Azar menegaskan, adalah memastikan bahwa semua kelompok komunal di bawah yurisdiksinya mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ia mencatat bahwa di negara-negara yang mengalami konflik sosial berkempanjangan, kekuasaan politik cenderung didominasi oleh satu kelompok identitas yang menggunakan sumber daya untuk mempertahankan kekuasaannya ini, atas kelompok yang lain. Untuk memapankan kekuasaannya ini, kelompok yang berkuasa akan berupaya meredam seminimal mungkin partisipasi kelompok minoritas.²³

²³*Ibid.* h. 23.

Berdasar catatannya ini Azar kemudian menyimpulkan bahwa, krisis semacam itu akan memperburuk situasi kompetitif atau konflik yang sudah ada sebelumnya dan mengurangi kemampuan Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar serta menyebabkan berkembangnya krisis secara lebih lanjut. Dengan kata lain, tipologi rejim dan tingkat legitimasi menjadi variabel penghubung yang sangat penting antara kebutuhan dengan konflik sosial yang berkempanjangan

4. Keterkaitan dengan dunia Internasional

Variabel ke empat ini tidak ada hubungannya dengan peran pemerintah/negara dalam memberi akses kepada kelompok-kelompok komunal untuk memenuhi kebutuhan dasar, keamanan atau pengakuan, tetapi sejauh mana kebijakan internal ditentukan oleh hubungan internasional.²⁴

Azar membagi hubungan internasional kedua bentuk yang berbeda, yakni ketergantungan ekonomi dan hubung klien. Negara-negara yang secara ekonomi tergantung pada sistem ekonomi Internasional, pada gilirannya akan menjadi lemah karena kebijakan pembangunan ekonominya ditentukan pengaruh luar. Ketergantungan inilah yang sering menjadi penolakan akses bagi kebutuhan kelompok-kelompok komunal menjadi makin parah, mendistorsi sistem politik dan ekonomi dalam negeri. Hal yang sama terjadi dalam hubungan *klient* dimana masalah keamanan suatu negara dijamin dengan imbalan

²⁴*Ibid.* h. 24.

kesetiaan. Kondisi semacam ini berpotensi mengganggu tanggung jawab utama mereka, karena loyalitas klient akan mengorbankan otonomi dan kemerdekaan, atau berhubungan dengan kebutuhan masyarakat sendiri, demi mengejar kebijakan dalam dan luar negeri.

Selain dari empat variabel yang menjadi pra-kondisi timbulnya konflik sosial berkepanjangan (PSC) ada lagi suatu komponen lain yang berperan dalam mengaktifkan potensi konflik yang tersembunyi yang oleh Azar diberi nama dinamika proses (*process dynamics*),

Dalam dinamika proses ini ada tiga faktor kunci yang mendorong akselerasi konflik, yaitu :

a. Strategi-strategi dan Aksi Komunal

Variabel ini mengacu pada potensi ‘pemicu’ yang mengaktifkan konflik laten yang kemudian meningkat menjadi konflik yang lebih luas dan mungkin disertai kekerasan. Azar merangkum proses ini sebagai berikut : pada awalnya, meski tidak selalu demikian, suatu pemicu dapat berupa peristiwa sepele, misalnya : penghinaan seseorang yang memiliki ikatan komunal yang kuat. Tapi masalah sepele itu cenderung menjadi titik balik karena perlakuan terhadap individu dipandang perlakuan kolektif. Pengakuan kolektif terhadap keluhan perseorangan tadi secara alami akan menyebabkan protes secara kolektif. Protes kolektif biasanya diikuti dengan aksi represif atau penekanan. Pada saat ketegangan meningkat, kelompok-kelompok komunal yang menjadi korban mulai menarik perhatian

konstituen mereka, tidak hanya untuk peristiwa itu saja tetapi juga untuk berbagai isu-isu lain yang melibatkan keamanan komunal, akses dan keamanan kebutuhan dasar (misalnya isu kemiskinan dan ketidaksdilan politik).

Berkembangnya insiden tersebut ke isu lain selanjutnya meningkatkan momentum untuk mengorganisir dan memobilisasi sumber daya. Pada saat tingkat organisasi komunal dan memobilisasi menjadi lebih besar, kelompok komunal lalu berusaha untuk merumuskan strategi dan taktik yang lebih beragam, yang mungkin melibatkan penbangkangan sipil, perang geliya atau gerakan seperatif. Se jauh mana peningkatan ini menjadi sebagian dipengaruhi oleh kemampuan kelompok komunal untuk secara efektif mengorganisir dan mengembangkan kepemimpinan yang serta kecenderungan mereka untuk mengumpulkan dukungan di luar batas-batas nasional yang pada gilirannya mengakibatkan konflik bersifat regional.

b. Strategi dan Tindakan Negara

Azar mencatat bahwa dalam kebanyakan kasus, respon negara terhadap keluhan komunal, terutama yang memiliki struktur pemerintah yang lemah, biasanya berupa represi koersif atau kooptasi instruktional untuk menyembunyikan tanda luar kelemahan atau kekalahan. Dalam banyak kasus, respon militan atau keras merupakan inti dari strategi negara dalam mengatasi perbedaan pendapat

komunal. Strategi keras tersebut mengundang tanggapan yang samadari kelompok-kelompok militan yang ditekan. Kooptasi bisa berfungsi untuk mengurangi keluhan komunal, tetapi biasanya dianggap sebagai manuver taktis untuk memecah oposisi dan mengalihkan perhatiannya. Kegagalan strategi kooptasi lebih lanjut membenarkan pilihan represif koersif, yang mengarah ke spiral atas bentrokan kekerasan.

c. Mekanisme konflik yang melekat

Persepsi dan motivasi di balik perilaku negara dan aktor-aktor komunal timbul berdasarkan pengalaman dan rasa takut terhadap kelompok-kelompok komunal tertentu. Dalam interaksi ini kesan buruk cenderung dihubungkan ke pihak lain, bahkan mungkin ada juga pemalsuan, sehingga cetra negatif secara timbal balik muncul mengakibatkan antagonisme komunal serta memperkuat konflik sosial yang berlarut-larut.²⁵

Menurut Paul Conn, konflik ini disebabkan oleh dua hal yaitu :*pertama,*

Kemajemukan horizontal yakni masyarakat majemuk secara kultural seperti suku, bangsa, agama, bahasa dan rasnya dan masyarakat majemuk secara horizontal sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi. *Kedua,* kemajuan vertikal seperti struktur masyarakat yang terpolarisasikan menurut pemilik kekayaan,

²⁵*Ibid.* h. 20-27

pengatahuan dan kekuasaan. “Yang lebih ironis adalah kemajemukan masyarakat secara kultural ini sangat mudah menimbulkan konflik sebab masing-masing orang berusaha mempertahankan budaya lain. Bahkan ini bisa menimbulkan sebuah ketegangan konflik berupa perang saudara (*Civil war*), separatisme dan lainnya

Berdasarkan kedua penyebab konflik di atas, ada ahli lain menambahkan bahwa konflik itu bisa muncul dari faktor internal maupun juga dari faktor sketrem. Faktor internal muncul dari dalam diri orang, kelompok masyarakat, organisasi ataupun negara itu sendiri sehingga penyelesaiannya membutuhkan hal-hal yang bersifat kekeluargaan, sedangkan faktor eksternal muncul ketika orang, kelompok masyarakat, organisasi atau negara itu berhadapan dengan yang lainnya sehingga proses penyelesaiannya berbelit-belit, bisa melalui perundingan atau dialog hingga penyelesaian dengan cara kekerasan, sebab masing-masing pihak ingin mempertahankan atau memperebutkan sesuatu yang diinginkan.²⁶

B. Solusi / penyelesaian

1. Pengertian penyelesaian Konflik Sosial

Penyelesaian memiliki 1 arti. Penyelesaian berasal dari kata dasar selesai. Penyelesaian memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda

²⁶ M.Fikri, *Implementasi Kebijakan Pemerintah* (Jakarta: Universitas Muhammadiyah, 2009), h. 27.

sehingga penyelesaian dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang berbedakan.²⁷

Penyelesaian konflik secara sosiologis, dapat berbentuk proses sosial yang bersifat menggabungkan (*associative processes*) serta proses sosial yang menceraikan (*dissociative processes*). Proses sosial yang bersifat asosiatif diarahkan pada terwujudnya nilai-nilai seperti keadilan sosial, cinta kasih, kerukunan, solidaritas. Sebaliknya proses sosial yang bersifat disosiatif mengarah pada terciptanya nilai-nilai negatif atau asosial, seperti kebencian, permusuhan, egoism, kesombongan, pertentangan, perpecahan dan sebagainya, jadi, proses sosial asosiatif dapat dikatakan proses positif. Proses sosial yang disosiatif disebut proses negatif. Sehubungan dengan hal ini, proses sosial yang asosiatif dapat digunakan sebagai usaha menyelesaikan konflik.

2. Macam-macam penyelesaian Konflik

Gaya manajemen konflik ada lima pendekatan dalam manajemen konflik sudah umum diterima. Tidak ada satu pendekatan pun yang efektif untuk semua situasi. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kemampuan menggunakan setiap gaya sesuai situasi.

1. **Kolaborasi (kerja sama)** adalah gaya menangani konflik sama-sama menang.

Orang yang memilih gaya ini mencoba mengadakan pertukaran informasi. Ada keinginan untuk melihat sedalam mungkin semua

²⁷<https://www.apaarti.com/penyelesaian.html>. Diakses, jam 10:53 tanggal 4 maret 2018.

perbedaan yang ada dan mencari pemecahan yang disepakati semua pihak. Gaya ini erat kaitannya dengan metode memecahkan persoalan dan paling efektif untuk persoalan yang kompleks.

Gaya ini mendorong orang berpikir kreatif. Salah satu kelebihan gaya ini adalah orang berusaha mencari berbagai alternatif. Semua pihak terdorong untuk mempertimbangkan semua informasi dari berbagai sumber dan perspektif. Namun, gaya ini tidak efektif bila pihak-pihak yang terlibat konflik tidak punya niat untuk menyelesaikan masalah atau bila waktu terbatas. Kerja sama butuh waktu. Bila diaplikasikan pada tahap konflik lebih tinggi, gaya ini dapat menimbulkan kecewaan karena logika dan pertimbangan rasional sering dikatakan oleh emosi yang terkait dengan suatu pendirian atau sikap.

Gaya kolaborasi menyatukan langkah semua pihak pada upaya mencari pemecahan bagi persoalan yang kompleks. Gaya ini tepat digunakan bila orang dan masalah jelas terpisah, dan biasanya tidak efektif bila pihak-pihak yang bertikai memang ingin bertengkar. Gaya ini dapat menjadi motivator positif dalam sesi *brainstorming* atau *problem-solving*. Pastikan setiap orang yang berkepentingan ikut berpartisipasi.

2. Mengikuti kemampuan orang lain atau disebut juga *placating* (memuaskan), adalah gaya lain untuk mengatasi konflik. Gaya ini menilai orang lain lebih tinggi dan memberikan nilai rendah pada

diri sendiri barangkali mencerminkan rasa rendah diri orang tersebut. Gaya ini juga dapat diguna dengan sengaja untuk menyanjung-nyanjung orang lain, sehingga buatnya merasa lebih tenang dalam menghadapi persoalan. Menggunakan gaya ini untuk memuji orang lain ada manfaatnya, terutama bila posisi anda secara positis tidak berbahaya dalam berusaha. Gaya mengikuti kemampuan orang lain berusaha menyembunyikan perbedaan yang ada antara pihak-pihak terlibat sejauh mungkin dan mencari titik-titik persamaan. Perhatian yang besar pada kepentingan orang lain menyebabkan seseorang berusaha memuaskan kebutuhan orang lain dengan mengorbankan kepentingan sendiri. Bila digunakan secara efektif, gaya dapat memelihara hubungan yang baik. Mengikuti kemampuan orang lain yang diguna secara tak sadar, akan mendorong berpandangan tentang bahwa anda bersikap seperti, “silakan perlakukan saya sekehendak hati anda.”

Gaya ini berguna bagi pemimpin perusahaan yang tidak begitu yakin akan posisinya atau khawatir telah berbuat kesalahan. Dengan menggunakan gaya mengikuti kemampuan orang lain, dia secara pasif menerima kekuasaan orang lain, mengulur waktu untuk melihat perkembangan keadaan, dan mencari alternatif pemecahan.

Gaya ini memberikan kekuasaan pada orang lain. Jika kekuasaan anda cukup besar, gaya ini dapat berguna untuk

membangun kepercayaan dan rasa percaya diri pada pihak lain.

Jika anda merasa pasti dengan posisi anda, gaya ini padat digunakan sebagai mekanisme untuk melimpahkan wewenang.

3. Mendominasi (menonjolkan kemampuan sendiri) adalah

kebaikan dari gaya yang mengikuti kemampuan orang lain. Gaya ini menekankan kepentingan sendiri. Pada gaya yang mengikuti kemampuan orang lain, seseorang mengesampingkan kepentingan sendiri. pada gaya mendominasi, kepentingan orang lain tidak digubris sama sekali. gaya ini efektif bila keputusan perlu segera diambil atau jika persoalan yang dihadapi tidak penting.

Gaya ini bisa reaksioner, didorong oleh keinginan menyelamatkan diri sendiri. Ini tercermin dalam aliran filsafat yang mengatakan, “lebih baik menembak mereka dari ditembak”. Bila suatu persoalan penting, gaya ini akan memaksa pihak lain memusatkan perhatian pada kebutuhan-kebutuhan yang spesifik.

Gaya dominasi bisa efektif bila ada perbedaan besar tingkat pengetahuannya yang dimiliki. Kemampuan menyajikan fakta, pertimbangan berbagai persoalan, memberi nasihat yang jujur, dan menggerakkan langkah nyata selama konflik, akan sangat berguna. Namun, langkah yang nyata dimiliki sisi lain, yaitu langkah yang salah. Salah menggunakan kekuasaan dapat menghambat sukses di masa datang. Gaya menonjolkan kemampuan sendiri juga paling

sering dikaitkan dengan sikap preman dan “taktik kekerasan” tukang catut kekuasaan.

Gaya ini sebaiknya hanya digunakan bila sangat diperlukan. Gaya ini berlaku selama anda memiliki hak dan kekuasaan perusahaan yang memiliki struktur hierarkis yang ketat cenderung menyukai gaya ini. Gaya bergaris dengan jelas siapa anak buah dan siapa berwenang mengambil keputusan. Jika anda bekerja di perusahaan yang menggunakan gaya untuk menghadapi bekerja dan konflik, anda akan melihat faktor sikap pendukung “pokoknya selamat dulu.”

4. Menghindari adalah gaya keempat dalam menangani konflik. Orang yang menggunakan gaya ini tidak memberi nilai yang tinggi pada dirinya atau orang lain. Ini adalah gaya “jangan merusak suasana”.

Aspek negatif dari gaya ini adalah melemparkan masalah pada orang lain atau mengesampingkan masalah. Orang menggunakan gaya ini menarik diri dari situasi yang ada dan membiarkan orang lain untuk menyelesaikannya.

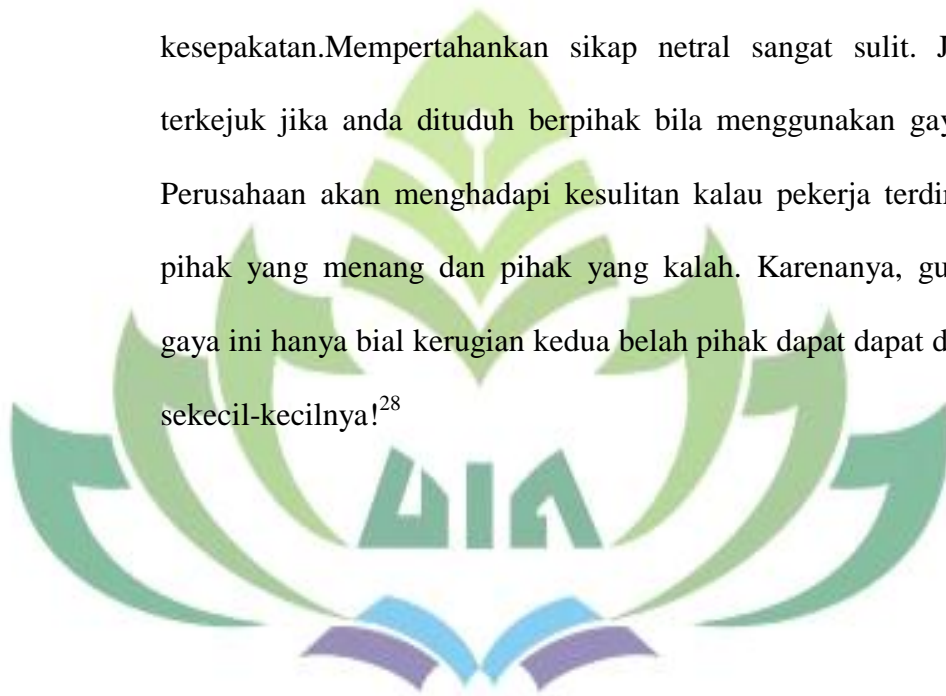
Bila persoalan yang dihadapi tidak penting, mengulur-ulur waktu dapat mengdinginkan suasana – suatu cara efektif menggunakan gaya menghindari. Gaya ini juga efektif dalam hal keperluan waktu. Misalnya, ketika rapat direksi, suatu mata acara rapat dikemukakan atau ditangguhkan.

Di sisi lain, gaya inibisa menjengkelkan bagi pihak lain karena harus menunggu lama untuk mendapatkan jawaban dan tidak banyak memberikan kepuasan, sehingga konflik cenderung akan terus berlanjut. Gaya menghindari mengulur waktu, maka gunakanlah dengan bijaksana. Jika anda melihat seseorang menggunakannya, itu pertanda ia tidak yakin dan perlu waktu untuk mempelajari situasi itu. Pastikan ada tindakan nyata bila waktu telah tersedia. Konflik biasanya tidak lenyap seiring berjalannya waktu.

5. **kompromi** adalah gaya lain untuk menangani konflik. Gaya ini digambarkan terletak di tengah-tengah diagram “lima gaya manajemen konflik” yang sudah disebutkan di atas tadi. Nilai gaya ini tidak tinggi dan tidak juga rendah, tergantung nilai kepentingan orang lain atau kepentingan diri sendiri. Gaya ini berorientasi pada jalan tengah, karena setiap orang punya sesuatu untuk ditawarkan dan diterima. Gaya ini sangat efektif bila belah pihak sama-sama benar, tetapi menghasilkan penyelesaian keliru bila salah pihak salah. Gaya kompromi paling efektif bila persoalan yang dihadapi kompleks atau bila kekuasaan seimbang. Kompromi dapat dipilih bila cara-cara lain tidak membuahkan hasil dan kedua pihak bersedia menjelaskan pendapat masing-masing dan mencari jalan tengah. Kompromi dapat berarti membagi perbedaan atau bertukar

konsesi.Semua pihak jelas harus bersedia mengorbankan sesuatu agar penyelesaian tercapai.

Keahlian bernegosiasi dan tawar-menawar adalah penengkap gaya kompromi. Manfaatnya, pihak-pihak yang bersangkutan didorong untuk membicarakan persoalan yang dihadapi dan mencapai kesepakatan.Mempertahankan sikap netral sangat sulit. Jangan terkejut jika anda dituduh berpihak bila menggunakan gaya ini. Perusahaan akan menghadapi kesulitan kalau pekerja terdiri atas pihak yang menang dan pihak yang kalah. Karenanya, gunakan gaya ini hanya bial kerugian kedua belah pihak dapat ditekan sekecil-kecilnya!²⁸



²⁸ Deborah Hutaaruk, Daniel P. Purba, Margaretha H. Eddy, *Kiat Mengenai Konflik*, Translation Copyright 2006, h.37-42.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Geografis Patani (Thailand Selatan)

Jumlah penduduk Muslim di negara Thailand adalah sekitar 15 persen, jauh lebih sedikit dibandingkan dengan penganut Budha yang jumlah sekitar 80 persen. Mayoritas penduduk yang Muslim ini tinggal di Selatan Thailand, khususnya di provinsi Patani, Yala dan Narathiwat. Tiga Provinsi ini sangat mewarnai dinamika di Thailand Selatan. Ini dikarenakan tradisi Muslim di wilayah ini telah mengakar sejak zaman kerajaan Sri Vijaya yang menguasai Wilayah Asia Tenggara, termasuk Thailand Selatan²⁹

Thailand Selatan letaknya di Semenanjung Tanah Melayu, yang dahulu dikenal dalam sejarah sebagai Semenanjung Emas. Kawasan Selatan yang berbentuk semenanjung itu terletak diantara garis lintang dan garisan bujur. Bentuk buminya adalah bujur memanjang yang panjangnya dari Utara ke Selatan sejauh 600 km. Lebarnya pula, di kawasan yang paling luas ialah 250 km dan yang paling sempit 64 km. Keluasan bumi di Selatan ialah 70.715.15 km persegi yaitu 13.78 % daripada keseluruhan bumi di Thailand

Patani merupakan salah satu provinsi (*changwat*) di Selatan Thailand, Provinsi provinsi yang bertetangga (dari arah selatan tenggara searah jarum jam adalah Narathiwat (Menara), Yala (Jala) dan Songkhla (Senggora). Masyarakat Melayu setempat menyebut provinsi mereka Patani Darussalam atau Patani Raya.

²⁹ Helmiati, *Sejarah Asia Tenggara*, (Yogyakarta: Nusa, Media, 2011), h. 231-232.

Patani terletak di Semenanjung Melayu dengan pantai Teluk Thailand di sebelah utara. Di bagian selatan terdapat gunung-gunung dan atraksi turisme seperti taman negara Budo-Sungai Padi yang berada di perbatasan provinsi Yala (Jala), dan Narathiwat (Menara). Di sini juga terdapat beberapa tumbuhan yang agak unik seperti palma Bangsoon dan rotan Takathong. Di kawasan perbatasan dengan Songkhla dan Yala pula terdapat sebuah taman rimba yang terkenal dengan gunung terjunnya, Namtok Sai Khao.³⁰

Patani adalah salah satu Negeri terletak di dunia Melayu. Kini dibawah kekuasaan pemerintah Thailand atau dikenal dengan panggilan empat propinsi dan lima kabupaten selatan. Patani' mempunyai keluasan tanah sebanyak 16,495 km persegi, mengikut pecahan kawasan provinsi-provinsi sebagai berikut:

Tabel 1.1
letak geografis

Provinsi	Keluasan
Pattani	1,940
Yala	4,521
Naratiwat	4,475
Satul	2,479
Pattani Barat (sebagian Songgora) Tiba, Cenak, Sabayoi, Nawi, Sadawa	3,080
Total	16,495 km persergi

³⁰ Wikipedia, "Provinsi Patani", https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Pattani, Diakses.20 juli 2017.

Kebiasaan tentara Thailand terhadap umat Bangsa Melayu di Patani sebenarnya telah mengakar sejak berdirinya negeri gajah putih itu. Ini tidak hanya menyangkut soal ketegangan budaya tetapi juga soal ketegangan berbangsa. Bangsa Thai yang mayoritas beragama Buddha kelihatannya belum menerima orang Patani sebagai masyarakat sebangsa.

Secara geografis Patani diklaim sebagai wilayah kerajaan Thai tetapi sebaliknya secara demografis dan kultural Patani selalu dilihat sebagai bangsa lain yang kehadirannya dianggap mengganggu keutuhan bangsa itu, akibatnya mereka didiskriminasi karena berbeda ras berbeda etnis, dengan demikian juga beda kultur. Perbedaan itu, yang membuat pemerintah Thai bersikap diskriminatif bahkan cenderung diekspresikan dengan tindak kekerasan baik yang terbatas maupun massa.³¹

B. Demografi Patani (Thailand Selatan)

Patanian terdiri dari banyak etnis meliputi beberapa warga penduduk bangsa. Dahulu Negeri Patani dapat menjadi masyarakat multikultural dengan terdiri dari Melayu Muslim, Melayu Buddha, Cina Muslim, Cina Buddha, Thai Muslim, Thai Buddha dan lain-lain yang mempunyai mayoritas penduduk melayu muslim beragama Islam.

Patani merupakan salah satu daripada empat provinsi Thailand yang mempunyai mayoritas penduduk beragama Islam 90% Thai Buddha 7%, Thai Cina 3% .

³¹<http://www.abaddemokrasi.com>. Diakses.20 juli 2017.



Gambar1.4 : Demografi

Berdasar data pusat statistik Kerakyatan 2012, bahwa jumlah penduduk di Patani seramai 2,659,958 orang. Mayoritas 90% adalahetnis Melayu Muslim, dan beberapa Suku Bangsa lain sepertisiam, Cina, Arab, Afganistan, India. Berikut adalah pecahan penduduk mengikut Provinsi.

Tabel 1.2

Provinsi	Jumlah Penduduk	Beragama Islam
Patani	671,615	88%
Yala	500,814	80%

Narathiwat	757,397	82%
Stul	305,879	74%
Patani Barat (Sebagian Songgora) tiba-Canak-Sabaya-Nawi, Sadawa	424,253	75%
Total	2,659,958	90%

a. Aspek politik



kehidupan minoritas Muslim di Thailand. Secara geografis, umat Muslim di Thailand bertempat di empat wilayah selatan Thailand yaitu; Patani, Yala, Narathiwat dan Satun.

Dalam tatanan sosial, muslimin Thailand mendapatkan julukan yang kurang enak untuk didengar. Yaitu *khaek* yang berarti orang luar, pendatang atau tamu. Meskipun pada mulanya *khaek* merupakan term untuk makro-etnis bagi orang selain *Thai* tapi lama kelamaan *term* tersebut dipakai pemerintah untuk mendeskripsikan kaum melayu-muslim diselatan Thailand.

Hingga istilah Thai-Islam dibuat pada 1940-an. Akan tetapi istilah ini menimbulkan kontradiksi karena istilah “Thai” merupakan sinonim dari kata “Budha” sedangkan “Islam” identik dengan kaum muslim melayu pada waktu itu. Jadi bagaimana mungkin seseorang menjadi budha dan muslim pada satu waktu? Maka dari itu kaum muslim melayu lebih suka dipanggil Malay-Islam,

Dari problem rasial seperti di atas, timbullah pengelompokan kaum muslim di thailand menjadi 2 golongan.

Pertama, *assimilated group*. Atau golongan yang terasimilasi atau berbaur dengan kaum mayoritas yaitu agama masyarakat Thai-Budha pada segala bidang tatanan kehidupan hanya saja tidak sampai pada masalah keagamaan.

Kedua, *unassimilated group*. Atau golongan yang tidak berbaur namun menyendiri di Thailand bagian selatan. Yang masih menunjukkan kultur melayu-Islam pada nama, bahasa dan adat. Golongan ini bertempat tinggal di daerah Yala, Narathiwat dan Pattani. Kecuali daerah Satun yang sudah terasimilasi dengan kelompok mayoritas Thai.

Dalam kaca mata historis, kehidupan sosio-politik kaum muslim Thailand selatan khususnya di patani bisa dibagi menjadi tiga fase.

kerajaan melayu Pattani, Menurut A. Teeuw dan Wyatt kerajaan ini berdiri sendiri tanpa aturan dari kerajaan Siam atau Thailand. Fase ini dimulai sekitar abad ke-14. dimana kerajaan melayu patani telah dibentuk,

“A. Teeuw dan Wyatt berpendapat bahawa Patani telah ditubuhkan sekitar pertengahan abad ke-14 dan ke-15. Pendapat mereka berasaskan kepada tulisan Tomes Pires dan lawatan Laksamana Cheng Ho ke rantau ini dalam tahun 1404-1433 T.M. (Teeuw & Wyatt 1970,3). Mengikut Hikayat Patani pula, Kerajaan Melayu Patani berasal dari kerajaan Melayu yang berpusat di Kota Mahligai yang diperintah oleh Phya Tu Kerab Mahayana (Teeuw & Wyatt 1970,68).”

Kehidupan Pattani di semenanjung Siam yang strategis menjadi tujuan pedagang pedagang dari berbagai penjuru dunia, sehingga menjadikan patani daratan yang

ramai dan sibuk. Sehingga dalam waktu yang singkat patani telah menjadi kerajaan yang kuat dan ramai dari segi ekonomi maupun politik. Hubungan patani dengan luar negeri yang baik menjadikannya selamat dari penjajahan negara Siam, Portugis dan Belanda.

Islam masuk di kerajaan Melayu-Pattani sekitar abad ke-13. Keadaan yang seperti ini menjadikan kerajaan melayu patani menjadi tuuan para pedagang pedagang muslim maupun non muslim dari belahan bumi barat dan menancapkan ajaran agama Islam pada sekitar abad ke-13.

Beberapa bagian dimana kerajaan melayu Pattani mendapatkan hak otonomi dari kerajaan Siam sebelum tahun 1808 M. Dan lambat laun mendapat pengaruh dari Sukhotai. Penjelasan struktur melayu patani di bawah kekuasaan Thailand ada pada tabel berikut ini,



Pre-1808	Patani was an autonomous state and gradually came under Sukhothai influence as a vassal state and under Ayutthaya control as a tributary state.
1808	Bangkok ruled and divided Patani into 7 muang [states]: (1) Patani (2) Nongchik (3) Yaring (4) Raman (5) Yala (6) Saiburi (7) Rangae
1832 1838	Revolts in the “Seven States”
1901	Bangkok under Rama V launched a central administration of the provinces and issued the “Regulations Concerning the Administration of the Area of the Seven Provinces” which aimed at increasing centralized Thai control over the area.
1902	Raja of Patani, Abdul Kadir, led a rebellion against the Thai Reform.
1906	The “Seven States” were made into a Circle[monthon] Patani
1909	The Anglo-Siamese Agreement established the present border between Thailand and Malaysia.
1932	Revolution overthrew the monarchy
1933	Abolished the Circle system; re-organization of the southernmost area into (1) Pattani Province (2) Yala Province (3) Narathiwat Province and (4) Satun Province

Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa muslim Pattani menjadi minoritas yang sepenuhnya diatur dibawah kekuasaan Thailand. Hingga pada akhirnya muslim Thailand yang berada di wilayah selatan Thailand dibagi dalam empat propinsi, Patani, Yala, Narathiwat dan Patuni.

Dimana masuknya pengaruh pengaruh barat pada awal abad ke-19 telah merubah Siam menjadi modern pada berbagai bidang, ekonomi, politik dan pendidikan, hal serupa telah memberi pengaruh pada generasi muda muslim Thailand selatan yang selama ini dalam kekuasaan Thailand dan menumbuhkan

semangat nasionalisme dalam diri mereka untuk menjadi merdeka dan berdiri sendiri dari kekangan Thailand.

Dimulailah perjuangan untuk menuntut kemerdekaan bagi wilayah muslim Thailand pattani dan empat wilayah lainnya di Thailand selatan. Kesempatan untuk merdeka semakin terbuka lebar ketika terjadi perang pasifik dengan Thailand dan Jepang melawan Britain dan Amerika. Setelah kekalahan Britain di Melayu dan kekalahan Amerika di Hawaii, pada 21 Desember 1941, Pibul Songgram berpihak kepada Jepang. Sebagai imbalan, Jepang berjanji akan menyerahkan wilayah Melayu utara, Kelantan, Kedah, Trengganu dan Perlis kepada Thailand.

Pada 25 Januari 1941, Thailand mengobarkan perang melawan Britain, akan tetapi berbeda dengan Amerika yang membiarkan kedua negara tersebut bertikai. Hal ini dimanfaatkan oleh Pattani dan wilayah muslim Thailand selatan untuk memanfaatkan Britain membantu mereka merdeka dari belenggu Thailand dan dipimpin oleh Tengku Muhyidin.

Akan tetapi Britain mempunyai kehendak lain dibalik perseteruannya dengan Thailand sehingga Tengku Muhyidin sadar bahwasanya dirinya telah menjadi mangsa percaturan politik Britain-Thailand.

Kegagalan Tengku Muhyidin dalam membebaskan wilayah selatan Thailand telah menggalakkan ulama muslim untuk turun berjuang di wilayah terbuka. Akan tetapi mereka sadar bahwa keadaan politik yang ada menjadikan mereka sulit untuk mendapatkan kemerdekaan. Lebih lebih ketika Britain dan Amerika

mengakui kedaulatan Thailand pada 1 Januari 1941. Hal ini menyisakan satu solusi bagi umat muslim di Thailand selatan, yaitu menuntut otonomi penuh bagi empat wilayah Thailand selatan dari penguasa Thailand.

Kegagalan merebut kemerdekaan bagi wilayah muslim di Thailand selatan telah memunculkan gerakan baru yang lebih besar. Pada tahun 1950 dan seterusnya hubungan Melayu muslim Thailand selatan dengan penguasa Thailand diliputi ketidakpercayaan, kecurigaan dan kesalah pahaman yang berlarut larut. Hal itu dikarenakan ketidaksetujuan komunitas muslim pada aturan aturan dan proses *asimilasi* yang dilakukan oleh pemerintah Thailand kepada komunitas muslim,

Pada tahun 1970, diberlakukan operasi pembersihan gerakan anti-pemerintah di wilayah muslim Thailand selatan. Keadaan menekan tersebut menimbulkan reaksi keras dari komunitas muslim dengan bermunculannya gerakan pemberontakan dan pembebasan wilayah muslim Thailand selatan; Barisan Nasional Pembebasan Pattani (BNPP), Barisan Revolusi Nasional (BRN), Bertubuhan perpaduan Pembebasan Pattani (PPPP) atau PULO. Yang menjadi motor pergerakan pembebasan muslim Pattani dan wilayah muslim lainnya.

Terlepas dari konflik etno-religious yang terjadi, umat muslim di Thailand selatan di masa kontemporer ini telah mengalami peningkatan yang signifikan di berbagai bidang. Meskipun tetap berada dalam tekanan dan diskriminasi dari pemerintah Thailand. Muslim di Thailand bukanlah komunitas baru dan juga bukan komunitas yang dipinggirkan. Maka dari itu muslim di Thailand saat ini adalah bagian tak

terpisahkan dari masyarakat Thailan secara keseluruhan dan tetap menjadi minoritas di berbagai bidang, sosial maupun politik.³²

b. Aspek Pendidikan

Sejak Islam datang dan berkembang di Selatan Thailand, pendidikan agama Islam telah banyak dilakukan di kalangan masyarakat Islam khususnya dalam bentuk pengajian Al-quran yang merupakan suatu kewajiban bagi setiap anggota masyarakat. Kegiatan pengajian ini dilaksanakan di masjid, di madrasah atau di rumah-rumah guru ngaji yang terdapat di setiap kampung. Guru al-Quran, yang di daerah itu dipanggil “Tok Guru al-Quran”, mendapat penghormatan yang tinggi dalam masyarakat. Mereka mengajar dengan suka rela tanpa mengharap bayaran. Tulisan Melayu yang dikenali dengan tulisan Jawi adalah tulisan yang digunakan di kalangan masyarakat Islam di Selatan, dahulu dan sekarang.

Selain dari tempat-tempat belajar al-Qur‘an sebagaimana disebut di atas, pendidikan Al-quran juga dilaksanakan di pondok-pondok pesantren. Di wilayah Selatan, pondok menjadi institusi pendidikan terpenting dan bahkan telah menjadi pusat pendidikan Agama yang terbesar di kawasan Selatan, termasuk di semenanjung tanah Melayu. Pondok telah menjadi model pendidikan yang memperoleh sambutan yang hangat dari masyarakat di Wilayah Selatan.

Selain berperan sebagai wadah institusi pendidikan yang sangat berpengaruh di tengah masyarakat. Pondok juga berfungsi sebagai benteng dalam mempertahankan agama dan budaya penduduk Muslim setempat. Para pelajar pondok (santri) mengamalkan cara hidup sehari-hari secara bersamasama dan

³²<https://artikelilmiah.wordpress.com/2009/01/15/minoritas-muslim-thailand-selatan/>, Diakses, jam: 08:38 Tanggal 27 Februari 2018.

seragam. Mereka sama-sama berkain sarung, berbaju Melayu, berkupiah putih dan samasama menggunakan tulisan Jawi dan buku-buku Jawi. Situasi inilah yang menjadikan pondok sebagai institusi yang mengikat masyarakat Islam di Selatan dan menyatukan mereka dalam suatu bentuk budaya tersendiri yang menampilkan ciri ke Melayuan dan ke Islaman. Pondok juga memiliki peranan yang sangat besar dalam memproduksi calon-calon pemimpin masyarakat. Mereka yang tamat dari pendidikan pondok umumnya dipilih sebagai pimpinan masyarakat, khususnya jawatan keagamaan seperti imam, khotib, bilal, ahli jawatan, kuasa masjid dan paling kurang menjadi tokoh lebai yang kedudukannya dihormati dalam masyarakat.

Di pihak lain, pendidikan kerajaan, yang berbentuk pendidikan formal, mulai diterapkan di tengah masyarakat Muslim di Selatan sejak pemerintahan Raja Culalunkon atau Rama, melalui pendirian sekolah di Patani pada tahun 1889. Pada mulanya, pendidikan formal kerajaan itu tidak mendapat sambutan yang positif di kalangan masyarakat Islam. Selanjutnya, pada tahun 1921, kerajaan mengeluarkan Undang-undang yang mewajibkan seluruh penduduk untuk bersekolah pada peringkat sekolah rendah mulai dari kelas satu hingga kelas empat. Walaupun undang-undang itu telah disosialisasikan, masyarakat Islam masih belum tertarik untuk mengirimkan anaknya bersekolah di lembaga pendidikan yang diciptakan oleh pemerintah itu. Menurut statistik tahun 1966, jumlah yang tamat kelas empat hanya 13.63% ini karena masyarakat masih terikat dengan pendidikan pondok.

Dalam menghadapi masalah ini, pada awal 1960-an lembaga pendidikan pondok diharuskan untuk didaftarkan sebagai institusi pendidikan ke pihak kerajaan. Kemudian, pada tahun 1966, pemerintah kembali membuat peraturan bahwa setiap institusi pendidikan agama diwajibkan terdaftar di kerajaan di bawah akta sekolah swasta yang mengajar Agama Islam. Sejak itu perkembangan pendidikan di wilayah Selatan mengalami perubahan, dari yang semula berupa pondok yang bebas beralih menjadi madrasah yang sistematis.

Dalam praktek, Madrasah (Sekolah Agama) menjadi institusi pendidikan gabungan antara Agama dengan non agama. Guru non agama dikirim oleh pihak kerajaan untuk mengajar di sekolah Agama. Kerajaan memberibantuan keuangan tahunan kepada sekolah-sekolah Agama yang mengikut syarat dan peraturan yang ditetapkan. Bantuan tahunan yang disebut *Udun* diberikan berdasarkan pada jumlah pelajar yang belajar di setiap sekolah yang ada.

Pada akhir tahun 1970-an, sekolah Agama yang mempunyai dua aliran pendidikan mulai diminati masyarakat. Banyak para orang tua yang mengirimkan anaknya untuk belajar di sekolah-sekolah yang mempunyai dua aliran tersebut. Kebanyakan mereka beralasan karena sekolah-sekolah ini memiliki guru yang kompeten dan merupakan alumni dari sekolah-sekolah ternama dan mempunyai dua aliran pendidikan. Akibatnya pondok dan sekolah kecil kurang mendapat perhatian dan sebagian besar mengalami kemerosotan.

Kenyataan ini dapat dilihat dalam data statistik tahun 1981, hal mana menurut data itu di Patani terdapat sebanyak 349 buah sekolah swasta (Sekolah Agama Rakyat) yang terdaftar. Tetapi yang betul-betul menjalankan pendidikan

dan pengajaran hanya 199 sekolah. Dari jumlah sebanyak 199 buah ini,, hanya 77 sekolah saja yang menjalankan satu aliran pendidikan (Agama saja), sedangkan selebihnya, sebanyak 122 sekolah, melaksanakan sistem pendidikan ganda, yakni pendidikan agama dan pendidikan umum.

Sejak awal 1980-an minat masyarakat terhadap sekolah Agama yang besar dan mempunyai dua aliran,makin besar. Hal ini bukan saja dikarenakan sekolah-sekolah tersebut memiliki fasilitas pendidikan yang lengkap, tenaga pengajarnya pun banyak yang merupakan lulusan luar Negeri yang dipanggil dengan sebutan ustaz. Sekolah-sekolah Agama yang demikian ini pada umumnya berpusat pada tiga wilayah yakni : Patani, Yala dan Narathiwat dengan jumlah pelajar rata-rata melebihi dari 1,000 orang.

Karena pesatnya perkembangan sistem pendidikan di 3 wilayah provinsi tersebut, maka para pelajar yang berada di luar provinsi banyak yang tertarik untuk menuntut ilmu di kota-kota tersebut. Kedatangan para pelajar dari luar provinsi ini selanjutnya memperkuat jalinan hubungan antar penduduk Muslim yang tinggal di wilayah yang berlainan. Perkembangan ini menyebabkan pihak kerajaan mengambil perhatian khusus dengan mengadakan suktan pelajaran pengajian Islam di sekolah kebangsaan dan juga pada tingkat Universitas.

Di luar dari institusi-institusi pendidikan yang telah diterangkan di atas, masih ada lagi institusi pendidikan Islam yang tidak formal dan di luar kawalan badan resmi kerajaan : yaitu pendidikan anak-anak dan pendidikan masyarakat umum. Kedua institusi pendidikan ini akhir-akhir ini mulai menampakkan

kontribusinya yang besar dalam pembinaan pengetahuan agama Islam dalam masyarakat Islam di seluruh wilayah Thailand bagian Selatan.

Berbeda dengan institusi-institusi pendidikan yang dikelola oleh pemerintah dan swasta, lembaga pendidikan yang baru ini justru dikelola oleh masjid dan banyak diminati oleh penduduk sekitar.

Sebagaimana pendidikan anak-anak, yang dinamakan “Tadikan” Pendidikan masyarakat umum berlangsung di masjid-masjid dalam bentuk majlis-majlis pengajian yang memiliki jadwal pertemuan yang tetap, baik secara mingguan, bulanan maupun tahunan. Forum-forum pengajian itu memiliki metode dan sistem tertentu yang mengacu kepada pendidikan luar sekolah.³³

c. Aspek Ekonomi

Kawasan Selatan adalah suatu kawasan yang subur dan kaya dengan bahan-bahan mentah. Wilayah ini menjadi penyumbang utama bagi pendapatan Negara. Di wilayah Selatan Thai terdapat hutan yang sangat kaya dengan berbagai macam jenis kayu. Di wilayah itu pula terdapat berbagai pertambangan terutama logam dan timah. Selain dari itu, Wilayah Selatan ini juga menduduki posisi penting dalam memproduksi hasil pertanian, seperti tanaman padi dan getah. Sedangkan wilayah perairannya, yakni di laut Cina Selatan dan laut Andaman, merupakan wilayah terpenting yang menjadi sumber perikanan.³⁴

Meski wilayah Selatan memiliki kekayaan dan sumber alam yang begitu melimpah, namun kedudukan ekonomi dan tingkat pendapatan dikalangan

³³ Ahmad Umar Chapakia, Politik Masyarakat Islam di Selatan Thailand 1902-2002, (Malaysia : University Kebangsaan Malaysia UKM, 2002), h. 39-42.

³⁴ *Ibid.* h.42.

masyarakat Selatan masih sangat rendah dibanding dengan wilayah lain di seluruh Negara. Berdasarkan data statistik terakhir, pendapatan perkapita bagi penduduk wilayah songkhla adalah sebesar US\$ 579.74, Patani sebesar US\$ 315.70, Yala US\$ 604.65 Narathiwat US\$ 512.26.

Kehidupan ekonomi masyarakat Muslim yang tinggal di pulau-pulau kecil di perairan pantai laut Cina Selatan Timur dan laut Andaman di Barat, lebih memprihatinkan lagi. Di pulau-pulau itu, penduduk setempat menggantungkan hidupnya dengan bertani, berkebun atau menangkap ikan di laut. Para nelayan ini umumnya terdiri dari para nelayan kecil yang melibatkan keluarga sebagai tenaga kerja inti. Mereka mencari ikan dilaut dengan menggunakan perahu kayu yang ukuran panjangnya tidak lebih dari 10 meter dan menggunakan alat penangkap ikan secara tradisional. Jarak tempuh mereka pun sangat terbatas tidak melebihi 5km dari tepian pantai mengingat mesin yang mereka gunakan itu masuk ke perairan ini dengan menggunakan alat dan cara yang dilarang oleh undang-undang. Mereka menggunakan pukat modern yang mampu menguras semua ikan-ikan yang ada di dalam laut, tanpa membedakan ikan-ikan yang besar ataupun kecil. Tidak jarang kapal itu juga menggunakan bom dan gas kimia yang mengancam kelestarian biota laut yang ada di wilayah tersebut. Menghadapi masuknya kapal-kapal asing ini, para nelayan setempat melakukan perlawanan, mulai dari menembaki kapalkapal asing tersebut hingga melakukan aksi unjuk rasa, menuntut pemerintah untuk ikut andil dalam menindak kapal-kapal tersebut dan menghukum pelakunya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Masalah lain yang juga melingkupi kehidupan para nelayan di wilayah ini adalah beban hutang kepada kaum pemodal yang kebanyakan keturunan Cina atau pun lembaga keuangan yang meminjamkan uang kepada mereka untuk membeli perahu dan alat-alat penangkap ikan lainnya. Beban-beban hutang itu menyebabkan pekerjaan dan kehidupan mereka terikat dan bergantung kepada kaum pemodal, yang sampai taraf tertentu ikut juga menentukan harga ikan yang mereka peroleh. Selain dari masalah-masalah di atas, masyarakat Patani juga menghadapi masalah lain yakni hadirnya sejumlah perusahaan ternak udang yang dimiliki oleh para pemodal asing yang masuk ke wilayah tersebut dengan cara menyewa atau membeli tanah di kawasan Patani. Berdirinya perusahaan-perusahaan ini telah mempersempit lahan penghidupan masyarakat yang menyebabkan sebagian mereka terpaksa pergi meninggalkan kampung halaman mereka dan berpindah ke daerah lain untuk mencari penghidupan yang baru. Banyaknya kaum perempuan yang bekerja dipabrik sardin yang dibuka dan dikelola oleh para pemodal asing berpengaruh pula bagi tradisi budaya masyarakat setempat yang semula pekerja mandiri berubah menjadi buruh di perusahaan asing.

Di bidang pertanian, yang merupakan mata pencaharian masyarakat lokal yang tinggal di wilayah pedalaman, persoalan-persoalan tertentu pun menghadang kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pekerjaan menanam padi yang secara umum masih dijalankan dalam bentuk tradisional, hampir sepenuhnya bergantung pada musim hujan. Hasil yang mereka peroleh dari pekerjaan ini pun sangat terbatas dan tidak mencukupi keperluan hidup sehari-hari. Meski baru-baru ini pemerintah telah

meluncurkan proyek pembangunan irigasi, namun masyarakat Islam memandang proyek-proyek itu dengan penuh curiga dan negatif, terutamanya terhadap langkah kerajaan yang memindahkan masyarakat Budha dari kawasan Tengah dan Utara ke wilayah-wilayah Selatan dan akhirnya membentuk koloni baru berupa perkampungan masyarakat Budha.

Sebenarnya ada juga sebagian masyarakat Patani yang menggeluti usaha perkebunan karet, namun karena lahan yang mereka miliki sangat sempit maka hasil yang diperoleh pun tidak begitu memadai. Akibatnya banyak di antara mereka justru memilih menjadi buruh di kebun karet milik orang Cina yang mempunyai banyak modal dan menggunakan teknologi baru. Persoalan lain yang juga mengganggu fikiran masyarakat Muslim Thai Selatan khususnya yang berada di kawasan Sempadan adalah Kerajaan membuka areal hutan dan gunung yang ada di wilayah setempat dan merubahnya menjadi kawasan perkebunan karet. Lahan-lahan milik pemerintah di wilayah tersebut diberikan kepada penduduk, dimana tiap-tiap keluarga yang terpilih diberi tanah selebar 25rai (4.5 hektar) untuk diolah menjadi kebun karet dan untuk mendirikan perkampungan yang dinamakan *Nikhom*. Bagi masyarakat Muslim setempat, proyek ini lebih banyak unsur politis ketimbang manfaat ekonomisnya karena sebahagian besar tanah proyek itu dimiliki oleh masyarakat Budha yang datang dari luar daerah menjadi golongan dominan diperkampungan *nikhom* itu. Kondisi dan situasi yang tidak kondusif inilah yang mendorong ratusan ribu anggota keluarga masyarakat Muslim Patani untuk berhijrah dari tempat mereka di Selatan, memasuki negara seperti Malaysia dan Arab untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak.

d. Aspek Sosial

Penduduk Muslim di Thailand Selatan meski secara nasional minoritas, namun memiliki posisi penting dan strategis dalam menopang keamanan dan kestabilan politik pemerintahan di wilayah Selatan. Ini dikarenakan masyarakat-masyarakat Muslim umumnya berpusat di wilayah-wilayah perbatasan antara negara Thailand dengan negara tetangga, khususnya Malaysia, yaitu di wilayah Pattani, yala, Narathiwat, dan Stul.

Dari sisi sosiologi, masyarakat di empat wilayah tersebut berada di kawasan desa, di tempat mana memiliki dan mempraktekkan tradisi dan budaya mereka sendiri, dengan ikatan sosial yang sangat kuat dan dipayungi oleh semangat kegotongroyongan yang tinggi khususnya dalam menghadapi perkara yang berkaitan dengan kepentingan bersama seperti mendirikan masjid dan sekolah.

Meski secara nasional masyarakat Muslim di negara Thailand merupakan kaum minoritas namun di wilayah Selatan, mereka adalah kelompok mayoritas dan menempati daerah-daerah tertentu. Bahkan di wilayah tertentu seperti di provinsi Sonkhla, wilayah di mana jumlah umat Islam hanya 20 % saja dari total penduduk setempat, namun karena mereka berkelompok dan berpusat di di wilayah tertentu, misalnya di *Jena*, *natewi*, *tepa*, dan *sebayo*, kondisi ini menjadikan mereka menjadi kelompok dominan di wilayah tersebut.

e. Aspek Agama

Fakta sejarah menunjukkan bahwa di bumi Selatan Thailand ini pernah berdiri sebuah negeri Islam yang dikenal dengan nama : Patani Darussalam.

Negeri itu berdiri pada pertengahan abad ke 18, dan pada awal abad ke 19 ia kemudian menjadi pusat penyebaran agama Islam terbesar di Asia Tenggara.

Sebagai suatu negeri yang menjadi sentral kegiatan dakwah, negeri Patani telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi penyebaran Islam di Kawasan Asia Tenggara dan melahirkan ulama-ulama besar yang karya-karyanya sampai sekarang masih dapat ditemui.

Di lihat dari tipologi aliran keagamaan yang berkembang, Mayoritas Muslim Patani terdiri dari kaum Sunni yang bermazhab Syafi'i dan Hanbali. Mereka merupakan penganut agama Islam yang taat dalam melaksanakan perintah agama. Nuansa-nuansa keagamaan dapat ditemui dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik dalam konteks hubungan antara individu dengan individu yang lain maupun hingga pengamalan nilai-nilai budaya masyarakat. Tempat-tempat ibadah senantiasa penuh oleh jamaah dan kegiatan-kegiatan pengajian agama pun terus berkembang dari waktu ke waktu. Fanatisme masyarakat terhadap agama Islam sangat tinggi sehingga setiap isu-isu yang berkaitan dengan agama muncul maka masyarakat langsung meresponnya secara intens. Sikap dan kecenderungan masyarakat yang responsif ini terkadang dimanfaatkan oleh para politisi untuk memperoleh dukungan sosial atau untuk menopang kepentingan politis tertentu.³⁵

Dari segi praktek pengamalan agama, masyarakat muslim Patani terbagi dalam 2 (dua) kecenderungan. Sebagian teguh melaksanakan tradisi keagamaan yang diwarisi secara turun menurun dari generasi terdahulu, sementara sebagian

³⁵*Ibid, h. 45.*

lagi, terutama kaum muda, lebih memilih mengamalkan agama secara murni tanpa dipengaruhi oleh tradisi ataupun budaya setempat. Kecenderungan yang terakhir ini muncul setelah banyak mahasiswa-mahasiswa Patani yang belajar di Timur Tengah pulang kembali ke kampung halamannya sambil membawa pemikiran dan pengetahuan keagamaan yang mereka peroleh selama belajar di luar negeri. Kepulangan mereka membawa pengaruh bagi pengamalan ajaran agama di Patani. Para pelajar ini sering mengkritik praktek-praktek pengamalan tertentu dan berupaya mendorong masyarakat untuk meninggalkan tradisi-tradisi keagamaan yang mereka anggap tidak memiliki dasar syariat yang jelas. Usaha para pembaharu ini kemudian memperoleh tentangan dari kelompok tradisional yang kemudian melahirkan dua jenis kecenderungan/ aliran yakni golongan Tua dan golongan Muda.

Pada sisi hubungan antar umat beragama, dapat dikatakan bahwa perbedaan agama, bahasa dan budaya antara masyarakat Melayu Patani yang mayoritas muslim dengan Masyarakat Buddhis Thai telah menciptakan sekat kultural yang kokoh dan sulit untuk ditembus. Masyarakat Muslim yang berada dalam posisi minoritas terkesan cenderung mengisolasi diri karena mengalami kesulitan dalam beradaptasi.

Ada sejumlah faktor yang mendorong mereka untuk mengambil sikap yang demikian; *Pertama*, karena kebanyakan mereka (terutama yang tinggal di daerah rural seperti Pattani, Yala dan Narathiwat) hanya dapat berbicara sedikit bahasa Thai atau tidak bisa sama sekali. Ini membuat mereka tidak mampu berkomunikasi dengan kaum Cina dan Thai Buddha. *Kedua*, berdasarkan

keyakinan agama, kaum Melayu Patani secara militan menolak perilaku sosial yang berkaitan dengan kedua kelompok tersebut. Misalnya mereka tidak dibolehkan menghadiri perayaan agama lain atau menikah dengan penganut agama lain. *Ketiga*, ketakutan kaum Melayu Patani bahwa interaksi dengan Thai Buddhis akan mengakibatkan anak-anak mereka menerima budaya Thai melalui proses asimilasi dan berakibat terkikisnya tradisi Melayu serta nilai-nilai ajaran agama Islam yang telah hidup dan dipertahankan dalam masyarakat selama berabad-abad lamanya.

Masyarakat Buddhis Thailand dengan masyarakat Muslim Patani sepertinya memang sulit untuk dipadukan. Sebagaimana dimaklumi antara kedua agama itu memiliki ajaran yang bukan saja berbeda tetapi secara lebih jauh justru bertentangan secara diametral. Sebagai suatu contoh, agama Islam melarang umatnya untuk melakukan penyembahan kepada suatu dzat selain Allah, sementara ajaran Buddha justru menempatkan penyembahan arwah leluhur dan penguasa alam ghaib sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam tradisi penyembahan keagamaannya. Begitu juga dengan masalah makanan, agama Islam melarang umatnya untuk mengonsumsi daging babi, sementara agama Buddha justru membolehkan. Dua contoh perbedaan di atas, ditambah masih banyak lagi perbedaan-perbedaan yang lain, membuat masyarakat Muslim Patani terpisah secara kultural dari mayoritas warga Thailand, yang ini sedikit banyak ada pengaruhnya dalam pergaulan sosial sehari-hari.

C. Sekilas Kerajaan Islam Melayu Patani

Fase sebelum Islam

Sejarah awal kerajaan Melayu Patani masih lagi diselimuti kekaburan. Dalam catatan sejarah tidak dapat dipastikan asal-usul atau tarikh sebenar kerajaan Patani didirikan. Mengikut catatan pelawat-pelawat china yang membuat perhubungan dengan negeri-negeri Asia Tenggara pada abad kedua masehi sebuah negeri bernama Lang-ya-shiu atau Langkasuka (Paul Wheatley 1961, 387-412) sudahpun wujud ketika itu. Berpandukan catatan tersebut ahli-ahli sejarah Eropah percaya bahawa negeri Langkasuka yang terletak di pantai timur Semenanjung tanah Melayu antara Senggora (songkhla) dan Kelantan itu adalah lokasi asal negeri Patani. Adalah dipercayai bahawa itu negeri terletak di daerah Yarang. Patani adalah sebuah kerajaan termaju di Semenanjung tanah Melayu dan sebuah pelabuhan yang penting sejak kurun 8 Masehi kerana Teluk Langkasuka (Teluk Patani sekarang) sangat sesuai dijadikan tempat kapal-kapal dagang berlabuh dan terlindung dari pada ribut tengkujuh. Paul Wheatley menjelaskan bahawa kerajaan Langkasuka menguasai jalan perdagangan timur-barat melalui segenting Kra dan kekuasaannya meliputi kawasan Semenanjung sehingga ke Teluk Benggala. Kerajaan Melayu Langkasuka wujud sehingga menjelang abad ketika belas dan di ganti oleh kerajaan Melayu Patani.³⁶

³⁶ Nik Anuar Nik Mahmud, *Sejarah Perjuangan Melayu Patani 1785-1954*, (Malaysia, 2006). h. 15

Fase sesudah Islam

Sejarah awal Patani jelas digalurkan hubungannya dengan kerajaan Melayu tua Langkasuka. Tome Pire yang menulis pada tahun 1512 M. di Malaka menegaskan kewujudannya mungkin di sekitar tahun 1390 an. Ini berdasarkan nama Patani bermunculan berbagai armad laut bertindak menyerang Perameswara di Tamasik karena membunuh tamagi, anakanda puteri Patani dengan seorang raja siam. Rajanya pertama beragam Islam, Sultan Ismail Syah' (1500-30 M.) adalah pengasas kerajaan Melayu-Islam Patani. Sejak kemunculan awal negeri Patani dan sepanjang sejarahnya hingga sekarang ini, ia tidak sunyi kisah perjuangan dalam siri peperangan menentang Siam. Musuh tradisi bangsa Melayu.³⁷

Karena letaknya yang strategis dari segi geografis, Patani menjadi tumpuan para pedagang dari timur maupun barat, untuk singgah di sana sambil beristirahat ataupun berdagang. Sehingga Patani menjadi pusat perdagangan ketika itu. Menurut ahli Antropologi, orang Patani berasal dari suku Jawa-Melayu. Karena suku inilah yang pertama kali mendiami tanah Melayu. Kemudian berdatangan pedagang Arab dan India ke daerah Pattani. Masuknya Islam ke Patani Sebagaimana kita ketahui, Islam masuk ke Asia Tenggara bukan dengan perang atau penaklukan, tapi melalui jalur dagang. Baik itu Indonesia, Malaysia, begitu juga Pattani (Thailand). Namun, kapan masuknya Islam ke Patani tidak diketahui secara pasti. Tetapi, kalau melihat karya sastra sejarah dan merujuk kepada parasejarawan, maka dapat diperkirakan bahwa Pattani menjadi negeri Islam pada tahun 1457 M.

³⁷ Mohd. Zamberi A. Malek, *Patani Dalam Tamadun Melayu*, (Dewan Bahasa dan Pustaka kementerian Pendidikan Malaysia Kuala Lumpur 1944).h. 1.

Masuknya Islam ke Patani, juga seperti sebuah cerita khayalan atau dongeng. Tapi memang begitulah proses masuknya Islam ke sana. Sebagaimana dikisahkan dalam buku-buku sejarah. Dikisahkan waktu itu, Patani dipimpin oleh seorang raja yang bernama Phya Tu Nakpa. Raja dikabarkan menderita sakit dan tidak kunjung sembuh. Dia mendengar, ada seorang tabib. Tabib tersebut mau mengobati sakit raja dengan syarat raja harus masuk Islam setelah sembuh dari sakitnya. Raja menyetujui syarat sang tabib dan berjanji untuk masuk Islam setelah sembuh. Lalu sang tabib pun mengobati raja. Tetapi, setelah sembuh sang raja mengingkari janjinya. Dia tetap saja memeluk agamanya. Kemudian raja sakit kembali dan diobati kembali. Kejadian itu terulang sampai tiga kali. Pada yang ketiga kalinya raja menyerah dan insaf. Setelah sembuh dari sakitnya, raja bersama keluarga dan pembesar istana memeluk Islam. Pada akhirnya, raja pun mengganti namanya menjadi Sultan Ismail Shah, yang bisa mengobati sakitnya. Sejak itulah Islam mulai berkembang di Patani dan ajaran Budha mulai ditinggalkan yang pada akhirnya hilang dari Patani. Islam berkembang dengan pesat di Patani tersebut. Dahulunya, Pattani bukanlah bagian dari Thailand (Siam), melainkan daerah Islam yang berkembang dan maju di Selatan Siam.

Sepeninggalnya, raja digantikan oleh putranya, Sultan Muzaffar Shah. Dia meneruskan dan memajukan negerinya. Tidak hanya itu, Sultan Muzaffar Shah juga melakukan lawatan ke negara tetangga, termasuk Siam. Tapi lawatan Sultan Muzaffar tidak diterima baik oleh Raja Siam. Karena kesombongan Raja Siam, yang menganggap dirinya lebih terhormat, membuat Sultan Pattani marah dan merasa direndahkan. Sehingga dia dan adiknya mengerahkan pasukan dan

menyerang Siam yang ketika itu sedang diserang oleh Burma. Akhirnya, Siam jatuh ketangan Sultan Muzaffar saat itu juga. Tak lama kemudian, Raja Pattani meninggal dan digantikan oleh adiknya. Sepeninggal adiknya, tahta diturunkan kepada putra Sultan Ismail Shah, yang menimbulkan masalah pada kesultanan. Mulailah terjadi perpecahan di dalam istana yang melibatkan keluarga raja juga putera-putera selir beliau.

Puncak keemasan dan runtuhnya Pattani Patani mencapai puncak keemasannya dizaman empat ratu yaitu; Ratu Hijau (1584-1616), Ratu Biru (1616-1624), Ratu Ungu (1624-1635), dan Ratu Kuning (1635-1651). Pada masa ratu-ratu tersebut, Patani sangat makmur dan kaya raya. Kekuasaannya pun meluas sehingga terkenal dengan sebutan Negeri Patani Besar. Kejayaan ini berlangsung selama 67 tahun. Ketika Ratu Kuning meninggal pada 1651, kejayaan Patani berkurang dan terjadi kemerosotan secara politik, ekonomi dan militer. Negeri Patani Besar meliputi; Kelantan, Terengganu, Patani Awal, Senggora dan Pethalung, yang tadinya bersatu mulai memisahkan diri. Bersamaan dengan kemerosotan ini, Siam bangkit dan berhasil mengusir Burma dari seluruh negeri. Patani ditaklukkan oleh Siam pada tahun 1785. Sejak saat itulah patani berada di bawah pemerintahan Siam.

Pada tahun 1909, Pattani resmi menjadi bagian dari Siam, yang kemudian mengganti nama dengan Thailand sampai saat ini.

Jatuhnya Patani ke tangan Siam (Thailand) pada tahun 1785 dan diikuti dengan perjanjian bermaterai Inggris-Siam pada tahun 1909, menjadi awal bagi

kesengsaraan orang Melayu Islam Patani yang membawa kepada berakhirnya pemerintahan raja-raja Melayu Patani.³⁸

D. Sekilas Sejarah Konflik Sosial di Thailand Selatan

Thailand merupakan Negara Kerajaan di Asia Tenggara yang memiliki populasi sekitar 65 juta orang. Thailand baru dikenal pada tahun 1939 yang ratusan tahun sebelumnya dikenal dengan Negara Siam. Thailand memiliki sejarah atas kekerasan dan pemberontakan, hal ini mulai terjadi ketika Thailand (Siam pada masa itu) menganeksasi Kesultanan Patani (catatan: “Patani” adalah Kesultanan Thailand Selatan, sedangkan “Patani” adalah salah satu provinsi di Thailand Selatan) pada tahun 1902 yang kemudian melahirkan gerakan-gerakan separatis. Separatisme dilakukan karena pada kala penganeksasian, terdapat kebijakan asimilasi dari segi linguistik dan kebudayaan. Asimilasi ini merupakan kegagalan Negara karena menimbulkan diskriminasi kepada penduduk Patani yang mayoritas Melayu Muslim yang dihadapkan dengan budaya Thailand yaitu Thai Buddhist. Larangan menggunakan bahasa Melayu, larangan mengajar ajaran Islam di sekolah-sekolah dan tindakan represif aparat Negara terhadap protes masyarakat Melayu Muslim seperti pelanggaran hak asasi mereka, pembunuhan di luar prosedur hukum dan penghilangan paksa. Beberapa hal yang disebutkan ini adalah bentuk-bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh Negara Thailand.

Semenjak asimilasi, konflik di Thailand merupakan suatu hal yang lumrah. Sekitar tahun 1960, gerakan separatis memuncak akibat diskriminasi

³⁸<http://pmi-sumedang.blogspot.co.id/2012/02/sedikit-sejarah-pattani.html>. Diakses, jam 14:04, 22 Februari 2018.

kepada masyarakat Melayu Muslim tidak kunjung usai. Konflik mulai meredam ketika memasuki tahun 1980, para ketua gerakan separatis mulai menyerah. Hasilnya, tahun 1990 merupakan saat dimana Thailand berada dalam kondisi stabil dalam hal konflik, meskipun masih terdapat 233 kematian yang terjadi karena konflik politik yang menyebar di Pattani, Yala dan Narathiwat, terhitung sejak 1979 – 2003. Namun, ternyata keadaan stabil tidak berlangsung lama.

28 April 2004, lebih dari 100 orang kelompok oposisi dari Pemerintah Thailand melancarkan serangan di 10 pos polisi yang tersebar di provinsi Pattani, Yala dan Songkhla. Serangan dilancarkan karena konflik berbasis agama antara Pemerintah Thailand dengan kelompok oposisi yang mayoritas beretnis Melayu dan beragama Islam yang sudah berlangsung lama di daerah Selatan Thailand.

Salah satu lokasi konflik pada saat itu adalah di Ban Krue Se yang terletak tujuh kilometer dari kota Pattani. Konflik bersenjata antara Pemerintah Thailand dengan kelompok oposisi kala itu menyebabkan 32 orang kelompok oposisi berlindung dalam Masjid Krue Se, sebuah Masjid berumur 425 tahun yang dianggap sebagai Masjid paling bersejarah di Pattani. Baku senjata berlangsung selama kurang lebih sembilan jam hingga tentara militer Thailand yang dikomandani oleh Jendral Panlop Pinmanee mengamankan Masjid Krue Se dengan membunuh 32 orang kelompok oposisi yang berada di dalamnya dengan senjata api kelas berat dan granat. Terdapat dua orang anak berumur 17 dan 18 tahun di antara 32 orang tersebut.

Tindakan Jendral Panlop Pinmanee dianggap merupakan tindakan yang berlebihan, mengingat Menteri Pertahanan Thailand, Chavalit Yongchaiyudh telah menginstruksikan Jendral Panlop untuk mengupayakan segala cara damai agar kelompok oposisi menyerah tanpa pertumpahan darah berapapun lamanya waktu yang dibutuhkan. Hal tersebut gagal dipenuhi oleh Jendral Panlop. Ia juga dianggap tidak proporsional dalam perintahnya untuk mengamankan Masjid Krue Se dikarenakan penggunaan senjata api kelas berat melawan kelompok oposisi yang dilaporkan hanya bersenjatakan golok dan satu senjata api.

Pelanggaran lain yang dilakukan oleh Pemerintah Thailand dalam peristiwa Krue Se adalah bahwa hingga sekarang, hanya dibentuk satu komisi untuk menginvestigasi peristiwa Krue Se di Pattani, mengingat serangan 28 April 2004 dilancarkan di 10 Provinsi. Tidak ada inisiasi dari Pemerintah untuk memperbaiki hubungan dengan masyarakat di sekitar lokasi kejadian serangan yang menciptakan trauma bagi masyarakat. Tidak ada kejelasan akan sanksi bagi pelaku pembantaian Masjid Krue Se. Tidak ada tindak lanjut penanganan 32 tubuh korban secara medis seperti otopsi yang seharusnya merupakan salah satu prosedur hukum agar jelas dan terang sebab kematiannya.

Tidak belajar dari pengalaman, Pemerintah Thailand kembali melakukan tindakan represif dan tidak proporsional kepada demonstran yang merupakan Muslim dalam aksi damai menuntut pembebasan kawan-kawannya yang juga seorang Muslim dan ditahan dengan tuduhan menyelundupkan senjata milik negara untuk kelompok oposisi, padahal mereka secara sukarela menjadi satuan pertahanan desa di Selatan Thailand. Demonstrasi dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2004 di

depan lahan seberang pos polisi yang terletak di Tak Bai, Narathiwat dengan jumlah massa aksi sekitar 2.000 orang, dengan tuntutan membebaskan kawan-kawan yang dituduh menyelundupkan senjata. Aksi demonstrasi yang berlangsung damai menjadi peristiwa berdarah ketika ada batu yang dilempar kepada kepolisian tanpa diketahui siapa yang melempar. Seketika itu juga, polisi menganggap para demonstran akan melakukan suatu gerakan perlawanan dan segera membalas dengan menyemprotkan gas air mata dan penembakan senjata api.

Penembakan senjata api kepada massa demonstran menyebabkan 7 orang meninggal dunia. Sesaat setelah penembakan tersebut, polisi kemudian mengepung aksi massa dan kemudian memerintahkan aksi massa untuk menempelkan badan ke tanah dan meletakkan tangan di belakang badan. Para aksi massa juga dibiarkan setengah telanjang dengan melucuti baju mereka. Setelah ribuan orang aksi massa berada dalam posisi tersungkur di lantai, mereka mulai dipindahkan ke dalam truk untuk dibawa ke tempat detensi. Komandan Deputy Sinchai Nujathit mengakui bahwa lebih dari 1.300 orang ditangkap dan dimasukkan ke dalam truk dan bergegas ke Provinsi Pattani yang memakan waktu lima jam dengan jarak tempuh 150 kilometer (9,32 mil). Para demonstran yang ditangkap dimasukkan ke dalam truk tanpa memikirkan keadaan masing-masing demonstran dan kapasitas truk serta perjalanan yang cukup lama. Hal-hal tersebut menyumbang lebih banyak kematian selain yang diakibatkan dari tembakan senjata api sebelumnya. Total terdapat 78 orang yang meninggal akibat sesak napas dan stress selama perjalanan.

Kejadian tersebut kemudian dinamakan sebagai Peristiwa Tak Bai. Pelanggaran hak asasi manusia telah dilakukan oleh Pemerintah Thailand, bahwa tindakan represif dari Militer Thailand tidak proporsional dengan aksi damai yang dilakukan massa aksi. Peristiwa Tak Bai terjadi enam bulan setelah peristiwa Krue Se yang notabenenya mengulang hal yang sama. Masyarakat juga seringkali mendapat pandangan bahwa Pemerintah Thailand tidak beritikad baik untuk mengungkap peristiwa Krue Se dengan memberikan sanksi bagi para pelaku pembunuhan massal 32 orang dalam Masjid Krue Se, justru mereka selalu mengatakan bahwa mengingat masa lalu tidak akan berbuah apapun, terlebih kasus Krue Se sudah dianggap selesai.

Tindakan Pemerintah dalam penanganan konflik di Selatan Thailand selalu memiliki pola yang sama, di antaranya adalah Militer dan Kepolisian Thailand selalu dilengkapi oleh senjata kelas berat, Militer dan Polisi selalu bersifat represif kepada massa yang merupakan Muslim, tidak adanya kejelasan sanksi bagi pelaku yang melakukan pembunuhan massal baik di peristiwa Krue Se maupun Tak Bai, tindakan diskriminatif kepada masyarakat Muslim.

Sejak Tahun 2004 hingga saat ini kekerasan telah menelan korban lebih dari 6500 orang mati terbunuh dan 11.500 orang luka-luka. Selain itu pemberlakuan Darurat Militer dan instrumen hukum keamanan lainnya di Selatan Thailand juga mengakibatkan sering terjadinya penangkapan sewenang-wenang, Polisi seringkali menangkap seseorang secara sewenang-wenang hanya didasarkan pada fakta bahwa orang tersebut bersekolah di sekolah tertentu atau hanya didasarkan karena sanak saudaranya pernah terlibat dalam tindak kekerasan

pada masa lalu. Akan tetapi, perlakuan seperti ini hanya dilakukan Pemerintah Thailand kepada masyarakat Selatan Thailand yang mayoritas Muslim.

Merupakan suatu kewajiban Negara untuk memenuhi, melindungi dan menghargai hak asasi manusia meskipun mereka memiliki pandangan yang berbeda dari pandangan mayoritas, begitu pula jika seseorang memiliki pandangan yang berbeda dengan Negara. Kejadian di Selatan Thailand mempertontonkan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Pemerintah Thailand kepada warganya sendiri. Lebih buruknya lagi, terdapat unsur diskriminasi dalam pelanggaran tersebut yang berbasis etnis dan agama. Pemerintah Thailand seakan tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan konflik di Selatan Thailand, dapat dilihat dari dua peristiwa berdarah yang telah dijabarkan di atas. Tanpa adanya penegakan sistem hukum yang berkeadilan oleh negara maka peristiwa berdarah lain hanya akan disusul oleh peristiwa berdarah lainnya.

Menjelang peringatan 12 Tahun peristiwa Takbai, tindakan represif dan non legal dari Kepolisian dan Militer Thailand kembali dilakukan kepada masyarakat Melayu Muslim baik di Patani maupun di luar Patani. Tanggal 10 hingga 12 Oktober 2016 lalu, tercatat 44 orang (8 perempuan dan 36 laki-laki) ditangkap di Bangkok, Thailand. Penangkapan dilakukan secara sewenang-wenang oleh Kepolisian Thailand dengan alasan untuk mencegah meningkatkan tindak terorisme mengingat akan ada peringatan Peristiwa Tak Bai pada 25 Oktober 2016[1]. Tindakan Kepolisian tersebut juga merupakan tindakan diskriminatif terhadap masyarakat Patani, bahwa Kepolisian telah menstigma

buruk peringatan Peristiwa Tak Bai tanpa didasari alasan yang jelas. Hingga tanggal 15 Oktober 2016, terdapat total 48 mahasiswa Muslim ditangkap secara sewenang-wenang oleh Kepolisian Bangkok didasari informasi dugaan plot bom yang muncul pada awal bulan Oktober lalu. Dari 48 pemuda yang ditangkap, 25 di antaranya dibebaskan tanpa tuduhan dan sisanya ditahan di penjara atau di fasilitas militer.

Hak Asasi Manusia tidak pernah terlepas dari tanggung jawab Negara, Melindungi (*Protect*), Menghormati (*Respect*), dan Memenuhi (*Fulfill*) adalah keharusan. Kenyataannya di Patani, Pelanggaran Hak Asasi Manusia terus berlangsung dengan maraknya pembunuhan dengan cara-cara diluar prosedur hukum, impunitas terhadap aparat militer dan kepolisian yang melakukan pelanggaran ham, penghilangan paksa, hingga pembungkaman hak berpolitik masyarakat. Negara Thailand memiliki kewajiban dalam hal pemenuhan hak asasi masyarakatnya, hal tersebut mencakup tindakan pencegahan, perlindungan dalam hal terjadinya pelanggaran, rehabilitasi korban dan masyarakat akibat pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi, hingga pemberian kompensasi kepada korban dan keluarga korban. Perlindungan hak asasi masyarakat Patani juga merupakan kewajiban Negara dan bahkan kewajiban utama Negara untuk menjamin hak-hak warganya. Tanpa pandang bulu dan tanpa terkecuali³⁹.

³⁹ LBH Jakarta, *Sejarah Kelam Thailand Dengan Perjuangan Masyarakat Patani*. Diakses, jam 10:25 tanggal 7 Desember 2017.

Peristiwa-peristiwa yang besar terjadi di Patani (Thailand Selatan)
janganlah kita melupakan apa yang telah pemerintah Thailand lakukan terhadap
Bangsa Melayu Patani.

1. 1 Januari 2004, tentera Thailand menembak 1 keluarga dan anak perempuan di perkosa di Basal Lapan Yala.
2. 28 April 2004, penembakan didalam masjid Kerisik Patani.
3. 25 Oktober 2004, pembantaian demonstrasi Takbai Narathiwat.
4. 17 Mach 2006, tentera Thailand menembak kedalam sebuah pondok di Sebayo Songkla.
5. 12 June 2007, tentera Thailand menembak sebuah pondok di Tasek Yala.
6. 27 June 2009, tentera Thailand menembak masyarakat yang sedang solat didalam masjid Air Tempayan Cha Airong Narathiwat.
7. 15 Mach 2010, tentera Thailand menembak ibu dan anak yang sedang menores getah Kucing Lepas Natathiwat.
8. 05 Mei 2010, Tentera Thailand menembak masyarakat didalam kedai kopi Di Kasut Yala.
9. 30 Mei 2010, pejuang Patani yang ditangkap mati leher tergantung didalam penjara.
10. 08 June 2010, ustaz ditembak oleh tentera Thailand di Benag Star Yala.

11. 30 Desember 2012, guru agama ditembak oleh tentera Thailand di Yakrang Patani.

12. 04 Februari 2013, tentera Thailand menembak satu keluarga yang pulang solat dari masjid di Bachok Narathiwat.

13. 02 Februari 2014, tentera Thailand menembak seorang ustaz dan imam masjid di Yingo Narathiwat.

14. 13 Februari 2014, pertempuran diantara tentera Thailand dengan para pejuang Patani di Bachok Narathiwat.

15. 23 Oktober 2010, tentera Thailand melaukan penembakan keatas sebuah kampung dan membunuh anak kecil di Bachok Narathiwat.

16. 09 Januari 2015, tentera Thailandd menembak seorang mahasiswa dan melektakan senjata api untuk difitnah di Mayor Patani.

17. 25 Mach 2015, tentera Thailand menembak 4 orang mahasiswa dan menagkap 22 orang tanpa kesalahan di Tiyang Deng Patani.⁴⁰

18. 09 Ogos 2015, tentera Thailand menembaka anak kecil usia 13 tahun di Yaha Yala.

19. 29 Mach 2017, tentera Thailand menembak 2 orang mahasiswa yg selesai belajar dari Indonesia di Jabat Narathiwat.

⁴⁰PAGE, Media Informasi News / BLOGGER, Amanat Penderitaan Rakyat Patani (AMPERA PATANI)".

BAB IV

ANALISA LATAR BELAKANG KONFLIK DAN PENYELESAIANNYA

A. Latar belakang konflik

Kebijakan pemerintahan Thailand terhadap umat Islam Patani telah direncanakan pada awal pemerintahan Chulalangkorn, dengan mengenalkan kebijakan reformasi administrasi melalui konsep Thesaphiban tahun 1897. Namun, kebijakan reformasi tersebut mulai diimplementasikan pada tahun 1902 hingga 1906.

Berdasarkan teori menurut Azar mengatakan Peran pemerintah dan negara, dapat menimbulkan konflik yang berpanjangan. Salah satu peran negara, demikian Azar menegaskan, adalah memastikan bahwa semua kelompok komunal di bawah yurisdiksinya mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ia mencatat bahwa di negara-negara yang mengalami konflik sosial berkemungkinan, kekuasaan politik cenderung didominasi oleh satu kelompok identitas yang menggunakan sumber daya untuk mempertahankan kekuasaannya ini, atas kelompok yang lain. Untuk memapankan kekuasaannya ini, kelompok yang berkuasa akan berupaya meredam seminimal mungkin partisipasi kelompok minoritas.

Maka kebijakan politik dalam peran pemerintahan dan negara itu bisa membawa tidak stabilan Negara dan juga bisa mengalami konflik yang berkemungkinan yang mana peneliti dapat data yaitu perjanjian Inggris-Siam dikenal juga sebagai perjanjian Bangkok 1909, adalah perjanjian antara

Inggris dan Thailand pada 1909. Perjanjian ini ditandatangani di Istana Raja Siam di Bangkok pada 10 Maret 1909 dan diretifikasikan pada 9 Juli 1909.⁴¹ Perjanjian ini berisi kesepakatan bahwa Inggris menyerahkan secara resmi Negara-negara Melayu di utara kepada Thailand. Yaitu, Patani, Narathiwat, Yala, Songkhla dan Satun menjadi wilayah Siam. Sedang Negara melayu utara lainnya yakni Kedah, Kelantan, Perlis dan Trengganu diberikan pada Malaysia.

William Chang meragukan bahawa akar konflik ada pada ketidakpuasan batin, kecemburuan, iri hati, kebencian, masalah perut, masalah tanah, masalah tempat tinggal, masalah pekerjaan, masalah uang dan masalah kekuasaan. Chang mengajukan pendapatnya bahwa selain unsur-unsur di atas, emosi manusia sesaat pun dapat memicu terjadinya konflik sosial.

Dari hasil penelitian dapat dari lapangan, konflik pasti ada akar bisa muncul sebuah konflik sesuai dengan teori mengatakan, peneliti akan sebutkan akar menjadi factor utama sebagai berikut:

1. Konflik bidang politik, Kehilangan kekuasaan kerajaan Islam Melayu Patani

Suatu kebijakan politik yang dijalankan pemerintahan Thailand untuk merampas bumi Patani melalui kekerasan yang sporadic, tindakan ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu: Pertama, menaklukan Patani kemudian mengintegrasikan kerajaan Patani sebagai suatu wilayah berada di bawah perlindungan kerajaan Siam Thai, dan kerajaan Patani harus menghantar

⁴¹Perjanjian Inggris-Siam 1909, https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Ingggris-Siam_1909, Diakses, 8 Mei 2018, Waktu 09:50.

bunga emas, dan diberi status sebagai negara yang otonomi di bawah naungan kerajaan Siam Thai (1902-1938). Kedua, melaksanakan politik yaitu, patani dijadikan suatu wilayah dalam system pemerintahan Negara Thailand dibawah konstitusi kerajaan, dan tidak dapat dipisahkan lagi di bawah dasar kesatuan Negara thailand.⁴²

Kebijakan politik integrasi Thailand terjadi dengan tidak melibatkan pihak Patani. Setelah sejak awal dianeksasi, kemudian wilayah intern Patani dirombak berdasarkan kebijakan reformasi administratif yang dimulai tahun 1902. Maka untuk mematahkan kembali kekuatan Melayu Patani, wilayah patani yang telah di bagi menjadi tujuh provinsi kemudian menjadi empat provinsi yang lebih besar, yakni Patani, Bangnara, Saiburi dan Yala.⁴³

Selelah negeri Patani besar jatuh dan ditaklukan oleh kerajaan Thailand, dan merubahkan sistem negeri yang berkerajaan menjadikan provinsi dari Siam Thailand

Dalam ranah politik dan pemerintahan, pemerintah Thailand mengubah wilayah patani menjadi sebuah provinsi, sekaligus mengubah struktur pemerintahan Patani yang semula berbentuk kesultanan atau raja-raja, menjadi dibawah pengawasan gubenur yang di tunjuk oleh pemerintahan pusat Thailand di Bangkok.

⁴² Wan Yunil Amri bin Wan Yuni Khairi, “ Jatuhnya Kerajaan Patani dan Dampak Perubahan pada Kehidupan Masyarakat Melayu Patani”, Skripsi, (UNIVERSITAS ISLAM NEGERA AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH 2017), h 34. t.d.

⁴³ Surin Pitsuwan, *Islam di Munghai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani*, (jakarta 1989). h.29

Jika mengikut sejarah atau kajian sejarah, sebelum itu kita akan melihat kembalikan sejarah silam dahulu, yang mana Patani dahulu menganut paham politik negeri Langkasuka seiring dengan waktu menjadi negeri Patani Darussalam yang pemerintahannya di pimpinkan oleh Raja-raja Melayu dengan kekuasaan sendiri, yang mana pada tahun 1785-1786, Patani jatuh oleh kekuasaan Siam, dan Patani di jajah oleh kerajaan Siam, yang menyebabkan Patani jatuh di bawah kekuasaan Siam.

Selama 222 tahun Patani dibawah kekuasaan penjajah, sehingga muncul gerakan-gerakanyang menyuarkan kebebasan, asalnya orang Melayu dengan kerajaan Siam, yang menjadi sebabnya jatuhnya negara Patani yang menjadi konflik, sama ada konflik pihak pembebasan dan juga dari pemerintahan sendiri, Masyarakat Melayu Patani anggap pejuang memikul senjata melawan Siam.⁴⁴

Pada awal permulaan Patani (negara Patani) di jajah oleh Siam (kerajaan Siam), pemerintahan Siam juga tidak ada keadilan terhadap Masyarakat Patani.⁴⁵ Fakta sejarahnya Patani pada sejak kerajaan langkasuka juga terletak pada negeri langkasuka pada pemerintahannya itu di pantai timur semannanjung tanah Melayu antara Senggora dan Kelatan itu adalah lokasi asal negeri Patani. Patani pada saat itu sangat maju di semannanjung tanah Melayu, Patani juga ada sebuah pelabuhan yang penting pada saat itu.

Melanjutkan kerajaan Islam Melayu Patani juga semakin maju dalam pemerintahan, Patani sebagai pusat perdagangan pada ketika itu, dan pada

⁴⁴ Muhammad Abdulkodir, Mahasiswa, Wawancara pribadi, 22 Februari 2018

⁴⁵ Karimah Ma'li, Mahasiswa, wawancara pribadi, 18 Februari 2018.

pemerintahan ratu-ratu Patani sangat makmur dan kaya raya, Patani ketika itu sampai puncak keemasan dan kekuasaannya pun meluas sehingga terkenal dengan sebutan negeri Patani besar.

Sehingga Patani ditaklukan oleh Siam pada tahun 1785. Sejak saat itulah Patani dibawah pemerintahan Siam. Maka pada tahun 1902. Patani di resmikan sebagai bagian dari Siam

Maka peneliti menyimpulkan dari data-data yang dapat, perjanjian Inggris-Siam yang membawa jatuhnya Patani besar di bawah kekuasaan Thailand, perjanjian yang berisi kesepakatan bahwa Inggris menyerahkan secara resmi Negara-negara Melayu di utara kepada Thailand. Yaitu, Patani, Narathiwat, Yala, Songkhla dan Satun menjadi wilayah Siam. Sedangkan Negara melayu utara lainnya yakni Kedah, Kelantan, Perlis dan Trengganu diberikan pada Malaysia.

Seterusnya pemerintahan Thailand melanjutkan dengan kebijakan reformasi administrasi melalui konsep Thesaphiban tahun 1897. Namun, kebijakan reformasi tersebut mulai diimplementasikan pada tahun 1902 hingga 1906. Kebijakan reformasi administrasi ini membawa respon kelompok minoritas (masyarakat Melayu Patani) tidak bagus sehingga membawa ada penolakan dan juga perlawanan.

2. Konflik bidang ekonomi, Ketidak keadilan dalam pembagian hasil bumi.

Maka apabila ada System Negara mengubah sehingga dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat yang lain pun ikut berubah, terutama dalam bidang ekonomi semua Negara mengutamakan membangun ekonomi yang kuat, pemerintahan Thailand menggunakan berbagai kebijakan-kebijakan di Negara Thailand sehingga negeri-negeri di bawah kekuasaannya diikutinya.

Kebijakan proses integrasi Patani ke dalam wilayah Thailand melalui penekatan pada kebutuhan ekonomi. Hal ini dilakukan, agar Negara memiliki pendapatan yang cukup dan memiliki sumber tenaga untuk mendukung pertahanan Negara. Berdasarkan tujuan inilah dapat diketahui, jika tahapan adaptasi yang dilakukan Siam adalah untuk penguatan dan rasionalisasi administrasi dan pengembangan ekonomi.

Pemerintahan Thailand menggunakan politik Eksploitasi di bidang ekonomi, melakukan penindasan ekonomi terhadap bangsa atau masyarakat Melayu Patani, yaitu mengeksploitasi semua sumber daya alam di Patani, penindasan ini dilakukan dengan politik monopolistik demi kepentingan golongan mereka dan untuk pembangunan kerajaan Siam Thai di Bangkok.

Ekonomi dan kemiskinan dianggap sebagai salah satu Faktor terjadinya konflik antara Masyarakat dan pemerintahan Thailand. Meskipun Wilayah Thailand Selatan merupakan tempat yang kaya akan sumber alamnya, tapi masih banyak masyarakat Melayu Patani dibawah garis-garis kemiskinan.

Pemerintah Thailand melakukan diskriminasi keatas bangsa melayu Patani dan memhisap kekayaan alam di Patani dengan cara pelahan dan tidak di sadari oleh bangsa melayu Patani.

Bangsa melayu Patani hari ini harus bangun dari tidur dan melihat apa yang telah di lakukan diskriminasi oleh pemerintah Thailand terhadap bangsa melayu Patani.

Kekayaan di Patani telah di rampas dan dikuasai oleh pemerintah Thailand, diantaranya:

1. Kekayaan Bumi.
2. Kekayaan Laut.
2. Emas.
4. Gas.
5. Minyak.
6. Bijih dan Timah.
8. Elektrik.⁴⁶

Kemiskinan yang terjadi di Thailand Selatan disebabkan tidak merata dalam pemasaran hasil bumi dari pemerintahan Thailand. Sembur daya alam di Thailand Selatan yang melimpah seperti yang disebutkan diatas, banyak anak-anak muda Patani merantau ke kemana-mana untuk mencari pekerjaan di sana dalam menentukan nasib hidupnya, karena di

⁴⁶ Media Informasi News,
https://www.facebook.com/permalink.php?id=428437300688981&story_fbid=60887039312340. Diakses, jam 10:44 Tanggal 27 Februari 2018.

Patani sendiri tidak ada lapangan kerja, bagi masyarakat lokal (melayu patani).

Kondisi ekonomi golongan Melayu-muslim semakin memburuk.

Sebagaimana dikatakan oleh Thomas:

Keadaan ekonomi di keempat provinsi dulu lebih baik dari pada di kebanyakan daerah-daerah pedesaan di Muangthai, dan tidak gitu lebih buruk di bandingkan dengan daerah-daerah tetangganya Malaysia, tapi sekarang keadaannya tidak begitu lagi (Thomas 1977-8)⁴⁷

Banyak hal yang berkaitan dengan sumber daya alam di Patani yang mendorong semangat masyarakat Melayu Patani untuk memanfaatkan dan memperkaya sumber daya alam dengan berbagai bentuk menemukannya, mempertahankan hak, peninggalan nenek moyang.

3. Konflik bidang budaya, tidak memberi keragaman.

Pemerintahan Thailand perdana menteri yang ke 3 Thailand namanya **Phibunsongkhram** menggunakan kebijakan asimilasi merupakan salah satu cara penghancur dan mempersiapkan kebangsaan Melayu, keturunan, sosial dan kultural. Politik ini dengan membawa penekanan ke atas Rakyat Melayu patani supaya mengakui di atas tiga konsep berikut:

- a) kebangsaan Siam
- b) kewarga negaraan Siam
- c) keturunan Thai

⁴⁷ Surin Pitsuwan, *Islam di muangthai Nasionalisme Melayu Masyarakat*, (jakarta 1989.), h. 13.

ketiga-tiga wacana nasional diatas telah di respon oleh Masyarakat Melayu Patani dengan menolaknya, namun pemerintahan merespon kembali dengan ancaman dan tuduhan melawan kerajaan dan berhak di cabur hak kewarganegaraannya.

Jatuhnya Patani ke tangan Siam (Thailand) pada tahun 1785 dan diikuti dengan perjanjian bermaterai Inggris-Siam pada tahun 1909, menjadi awal bagi kesengsaraan orang Melayu Islam Patani yang membawa kepada berakhirnya pemerintahan raja-raja Melayu Patani.⁴⁸

Setelah jatuhnya neraga Patani di bawah Kekuasaan Thailand, maka pada tahun 1932 ada perubahan pemerintahan Thailand yaitu menggantikan monarki mutlak menjadi pemerintahan demokrasi berlembagaan, jadi diantara perdana menteri yang ke 3 Thailand namanya **Phibunsongkhram** dia mengadakan satu kempen untuk membangun dan membina kembali negara Thailand dengan melalui polisi-polisi revolusi kebudayaan, ini menjadi poin pertama dalam konflik sosial antara masyarakat Melayu Patani dengan pemerintahan Thailand selepas dari pada Melayu Patani jatuh dari pada jajahan Thailand.

Yaitu salah satu tadi Kebijakan pemerintah yang nasionalis (*polisi ratanium*) 1938 yang membuatkan menjadi latar belakang konflik karena

⁴⁸<http://pmi-sumedang.blogspot.co.id/2012/02/sedikit-sejarah-pattani.html>. Diakses jam 14:04, 22 Februari 2018.

kebijakan itu juga untuk mengasimilasi dan juga intergrasi orang Melayu Patani supaya menjadi Thai yang berlandas Siam tulin itu latar belakang.⁴⁹

Berdasarkan hasil pemaparan diatas, maka dapat dipahami bahwa kebijakan Asimilasi itu menjadi masyarakat minoritas (masyarakat Melayu Patani) merasa tidak adil dan juga tertindas dalam kebijakan tersebut karena salah satu masyarakat minoritas harus dikerbankan atau dihilangkan. ini adalah satu-satunya langkah kerajaan pada ketika itu yang menyakitkan hati orang-orang Melayu. Orang-orang Melayu Selatan tidak dibenarkan menggunakan nama Melayu, berpakaian Melayu, berbicara dan menulis dalam bahasa Melayu serta mempelajari agama Islam. Dengan hal tersebut memicu kemarahan orang Melayu terhadap pemerintahan Pibul yang menghapuskan undang-undang Islam.⁵⁰

Maka dari kebijakan asimilasi juga menimbulkan faktor yang lain, seperti faktor bahasa dan agama yaitu bahasa salah satu media dalam komunikasi sehari-hari untuk masyarakat Melayu Patani bahasa akan melahirkan konflik sebab bahasa yang perintah thailand terapkan pada masyarakat Patani menggunakan bahasa Thai. Jadi memaksa akan melahirkan konflik Dan Agama adalah keperjayaan. salah satu pemerintah Thai bermaksud untuk campur bagi mana untuk masyarakat Melayu Patani menyalahkan dalam aqidah untuk dalam mengamalkan maka agama salah satu akan membawa konflik.⁵¹

⁴⁹ Hasni Ibrohim, guru, wawancara pribadi, Yala, 19 Februari 2018.

⁵⁰ Nik Anuar Nik Mahmud, *Sejarah Perjuangan Melayu Patani 1785-1954*, (Malaysia, 2006) h.56.

⁵¹ Muhammadsoffee weberahing, Mahasiswa, Wawancara Pribadi, 2 Februari 2018.

Orang-orang Melayu Patani Darussalam dilarang menggunakan bahasa Melayu, memakai pakaian Melayu, menulis melayu dan mempelajari agama Islam.⁵² inilah kebijakan-kebijakan pemerintahan Thailand pada tahun 1938 yang menjadi latar belakang konflik antara masyarakat melayu dan pemerintahan yang berkuasa.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti menyimpulkan latar belakang konflik sosial di thailand Selatan yang menjadikan faktor utama adalah faktor sejarah karena mengikut fakta sejarah, Patani pernah berdaulat dan mempunyai kerajaan sendiri dengan keadaan rakyat damai dan sejahtera, pada tahun 1902 di kuasai oleh Pemerintahan Thailand sampai saat sekarang, maka sebahagian masyarakat Melayu Patani ingin membebaskan diri dari pemerintahan Thailand.

B. Penyelesaian/Solusi Konflik di Thailand Selatan.

Dari hasil wawancara juga mengatakan Pihak kerajaan (Pemerintahan) usahanya untuk menyelesaikan konflik yang ada ditiga wilayah Selatan Thailand semenjak dari tahu 2004 M. hingga saat ini.⁵³ pemerintahan Thailand sendiri juga berbagai usaha untuk menyelesaikan konflik di Thailand Selatan, seperti pemerintahan meningkatkan kekuatan militer dalam menjaga keamanan,⁵⁴ menurunkan modal yang sangat banyak di Thailand Selatan (Patani)⁵⁵

⁵² Herry Nurdi, *Perjuangan Muslim Patani*, (Kuala Lumpur, 2010) h.81.

⁵³ Muhammad Soffee Waeberahing, Mahasiswa, Wawancara pribadi, 2 Februari 2018.

⁵⁴ Muh.Rasul Hakim, Mahasiswa, wawancara pribadi, 9 Januari 2018.

⁵⁵ Abdulhafiz ha'ma', Mahasiswa, Wawancara pribadi, 10 Februari 2018.

14 tahun konflik Patani Thailand Selatan 2004-2017, 14 tahun menghabiskan subsidi kemanan 290.901,6 Juta (Bath=mata Uang Thailand), sejak insiden serangan perampokan di Camp Batilion Tentera Thailand, di Peling, Narathiwat pada tahun 2004 sampai sekarang, menurut statistik berdasarkan laporan deepsouth dan Thai TBS media Thailand, insiden kekerasan tercapai jumlah total semua 15.164 kasus, terpisah dari kasus keamanan 9.823 kasus, kasus criminal dan sabotase 3.982. dan kasus lain-lainnya yang belum ketahui jelas 1,359.

Isu selanjutnya yang harus diperhatikan adalah pengeluaran anggaran subsidi Negara untuk menyelesaikan konflik Patani Thailand Selatan baik dalam komisi keamanan kerja dan pembangunan Masyarakat. Dari tahun anggaran 2004-2017 pada tahun fiskal 2018 ini, total anggaran selama 14 tahun konflik Patani dihabiskan dibawah anggaran subsidi Negara sekitar 93,4 triliun Dollar atau 300 juta Bath. Terdapat dibagi dalam tahun fiskal sebagai berikut;

2004 – 13.450 juta Bath.

2005 – 13.674 juta Bath.

2006 – 14.207 juta Bath.

2007 – 17.526 juta Bath.

2008 – 22.988 juta Bath.

2009 – 27.547 juta Bath.

2010 – 16.507 juta Bath.

2011 – 19.102 juta Bath.

2012 – 16.277 juta Bath.

2013 – 21.124 juta Bath.

2014 – 25.921 juta Bath.

2015 – 25.744,3 juta Bath.

2016 – 30.886,6 juta Bath.

2017 – 12,692 juta Bath (hanya untuk Rencana terpadu)

Tahun 2018 – 13,255,7 juta (hanya untuk rencana terpadu)

Jumlah Bath 290.901,6 juta Bath.⁵⁶

Pemerintahan Thailand juga berbagai usaha untuk di Thailand Selatan menyelesaikan konflik sehingga dana-dana yang menggunakan sehingga habis banyak untuk menyelesaikan masalah-masalah (konflik) di Thailand selatan.

Maka dari data-data yang peneliti dapat, peneliti memaparkan tiga bidang yang penting menyelesaikan yang di lakukan oleh pemerintahan Thailand.

1. Bidang politik, Pemerintahan Thailand memberi hak memerintah Wilayah bagi Orang Melayu Patani.

Setelah Patani di taklukan oleh kerajaan Thailand pada tahun 1785 M.pada tahun 1815 M. kerajaan Thailand menggunakan politik jajahan dengan nama *Divide and Rule*. Di bawah dasar ini “negeri Patani besar” di pecah kepada tujuh “negeri kecil” yaitu Nongchik, Jambu, Yala, Teluban, Legeh (Range), Raman dan Patani sendiri.⁵⁷ dan sehingga disusun oleh kerajaan Thailand dari tujuh negeri kecil menjadi tiga negeri dan pada tahun 1916 M.

⁵⁶Turanisia, <http://www.turanisia.com/infografik-genap-14-tahun-konflik-patani-thailand-selatan/>, Diakses, jam 14:42 Tanggal 7 Mei 2018.

⁵⁷Ahmad Fathy Al-Fatani *pengantar sejarah patani*, (Pustaka Darussalam 1994). h. 60.

menggantikan negeri kecil menjadikan namanya Wilayah yang ada sekarang yaitu Patani, Yala, dan Narathiwat.

Pemerintahan Thailand diberi status sebagai negara yang otonomi di bawah naungan kerajaan Siam Thai (1902-1938).

Dalam pemerintahan Kerajaan Siam (Thailand) yang ke 5 pada tahun 1873-1910 M. memberikan hak untuk bagi orang Melayu memerintah wilayah Melayu sebagai kepala Wilayah (Gubernur). Dan kebanyakan Gubernur-gubernur yang memerintah Wilayah Patani yang dibagikan oleh kerajaan Thailand itu kebanyakan dari orang Melayu Patani sendiri.⁵⁸

Untuk menghindari akibat-akibat yang serius, Raja Chulalongkorn mengadakan kompromi dan menyetujui bahwa Bangkok tidak akan memaksa kehendak dibidang hukum keluarga dan hukum Waris yang peka itu. “Hukum pidana dan perdata akan diberlakukan”, demikian bunyi dekrit itu, kecuali dalam kasus-kasus yang melibatkan suami dan istri, dan soal warisan di mana baik penggugat maupun tergugatnya, atau hanya tergugatnya saja, adalah orang-orang Muslim; dalam kasus-kasus itu yang akan ditetapkan adalah hukum Islam. (Pasal XXXII)⁵⁹

Upaya untuk mengintegrasikan kaum ulama ke dalam birokrasi Negara, dilaksanakan dengan banyak cara; dan cara itu tergantung kepada suasana politik. Ketika terjadi revolusi konstitusional di tahun 1932, pemerintah

⁵⁸ Arifin Binji', Abduklah Lomae, Suhaimi Ismae, *Patani Sejarah Politik dan Alam Melayu*, Jilid 3, (Hatyai, Songgora).h.330.

⁵⁹ Surin Pitsuwan, *Islam di muangthai Nasionalisme Melayu Masyarakat*, (jakarta 1989.), h.93.

memperbarui upaya untuk menyeragamkan dan control praktek-praktek hukum di kalangan Melayu –Muslim di Patani Raya.⁶⁰

Mengingat Sri baginda Raja menganggap belum ada ketertiban dalam *sala To' kali* yang cocok untuk waktu sekarang; dan mengingat Sri Baginda Raja menghendaki agar rakyat yang menganut agama Islam memperoleh keadilan dan fasilitas dalam urusan-urusan peradilan mereka yang menyangkut soal-soal perkawinan dan warisan, yang dianggap berkaitan dengan agama mereka; maka Sri Baginda Raja dengan ini menitahkan agar ditempat prosedur berikut ini hubungannya dengan pengadilan-pengadilan Islam:

- 1) Tiap Gubenur (di provinsi-provinsi Melayu) harus memilih *To Hajji* (Haji), yang memilih pengetahuan tentang Al-quran dan yang hormati oleh rakyat di provinsi yang bersakutan, dan mengangkatnya menjadi *To Kali* (Qadi). Jumlahnya terserah kepada kebijakan gubenur, tapi tidak boleh kurang dari 6 orang. Mereka akan bersidang dan membahas kasus-kasus perdata yang menyangkut hukum Islam, yakni, kasus-kasus yang menyangkut warisan dan perkawinan. Tapi pemilihan mereka harus mendapat persetujuan gubenur jendera daerah itu.
- 2) Apabila kedua pihak dalam sengketa hukum adalah Muslim, atau hanya pihak tergugat saja yang muslim, dan mereka mengajukan sengketanya kepada pengadilan biasa, maka kedua pihak diharuskan memilih para *kali* dari panel yang sudah terbentuk, untuk bermusyawarah dan memberikan putusannya sesuai dengan agama Islam dan adat kebiasaan.
- 3) Apabila ada lebih dari satu orang *Qadi*, dan di antara terjadi perbedaan pendapat, maka mereka harus memilih seorang *To' Kali* sebagai ketua dalam panel, dan pendapat mayoritas akan merupakan putusan final.
- 4) Para *Qadi* harus mempelajari kasus-kasus itu, dan apabila diperlakukan aksi-aksi, pengadilan harus menyediakan kemudahan-kemudahan untuk menggailnya. Saksi yang memenuhi panggilan harus diambil sumpahnya oleh para *Qadi* sesuai dengan Islam. Mengenai kompensasi bagi para saksi itu, apabila Islam atau adat

⁶⁰ *Ibid*, h.103-104

tidak menentukannya, maka hal itu akan ditetapkan sesuai dengan UU pembuktian, tahun 1895.

- 5) Setelah apara Qadi itu selesai bermusyawarah dan memberikan putusan, maka hakim-hakim Tahi pada pengadialan biasa didaerah yang bersangkutan akan mengukuhkan putusan (dari *To' Kali*) itu. Mengenai kompensasi bagi pihak-pihak yang bersengketa, atau denda atau biaya yang harus dibayar, *To' Kali* akan menetapkan sesuai dengan hukum Islam atau apa yang lazim menurut adat.
- 6) Setelah hakim-hakim Thai menjatuhkan putusan final sesuai dengan pendapat *To' kali*, penggugat tidak boleh naik banding, kecuali apabila putusan final itu menyimpang dari putusan *To' kali* dalam hal itu, penggugat atau tergugat harus naik banding kepada gubenu daerah yang bersangkutan.
(Surat dengan Meterai Kerajaan, Kementerian Dalam Negeri 7/9669, 10 Desember 1903).⁶¹

Perkembangan era 1990-an merupakan masa pengukuhan hubungan dan keamanan antara Bangkok dan wilayah-wilayah Selatan Thailand. Kebijakan-kebijakan kerajaan Demokrat Thai yang memegang tampuk pemerintahan mencoba pendekatan baru dengan program pengintegrasian, setelah sekian lama mengadopsi system exclusion. Peranan orang Melayu dalam Politik kebangsaan Thai dalam Tahun 1990-an mulai membaik. Terbukti pada periode ini, banyak tokoh-tokoh Islam yang memegang jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan Kerajaan Tahi.⁶²

Pemerintahan Thailand meberikan otonomi Hukum kepada Masyarakat Mealayu Muslim di Thailand Selatan, menghendaki agar

⁶¹ *Ibid*, h.96-97.

⁶² Niaripen Wayeekao, *Berislam dan Bernegara bagi Muslim di Patani perspektif Politik Propektik*, Skripsi, (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2016), h.99. t.d.

rakayat yang menganut agama Islam memperoleh keadilan dan fasilitas dalam urusan-urusan peradilan mereka yang menyangkut soal-soal perkawinan dan warisan, yang dianggap berkaitan dengan agama mereka.

2. Bidang ekonomi, membuka kesempatan untuk pekerjaan

Pihak kerajaan (Pemerintahan) usahanya untuk menyelesaikan konflik yang ada ditiga wilayah Selatan Thailand semenjak dari tahu 2004 M. hingga saat ini, pemerintahan Thailand membukakan lapangan kerja bagi masyarakat Melayu Patani contohnya pejabat pemerintahan di Wilayah Patani dan sebagainya.

Sekolah dasar di Wilayah Thailand Selatan dahulu sangat jarang sekali bagi orang-orang Melayu Patani yang dapat mengajar atau menjadi guru-guru di sekolah dasar karena tidak ada kesempatan bagi mereka, dan sekarang yang mengajarkan sekolah dasar di Wilayah Thailand Selatan rata-rata orang-orang Melayu Patani, dan sekolah Melayu (Tadika) di gaji oleh pemerintahan Thailand, sehingga Imam, Khotib dan Bilal juga di gaji oleh pemerintahan Thailand.

Pemerintahan Thailand mengeluarkan modal yang sangat banyak di Thailand Selatan (Patani)⁶³ bagi masyarakat yang sudah usia 60 keatas mendapatkan tunjangan usia atau *duit tua*, anak-anak yang cacat atau kurang sempurna, masyarakat yang status miskin pemerintahan Thailand

⁶³Abdulhafiz ha'ma', Mahasiswa, Wawancara pribadi, 10 Februari 2018.

juga mengadakan duit sumbangan bagi mereka tersebut. Dan membagikan binatang-binatang ternak, dan sebagainya.⁶⁴

Sebagian masyarakat Melayu Patani yang ingin membebaskan dari pemerintahan Thailand yang tinggal di pergunungan karena kesembunyian diri dari pemerintahan dan dari pemerintahan Thailand juga mengadakan program harapan baru, memberikan pekerjaan yang layak.

Pemerintahan Thailand usaha dalam membangun ekonomi yang lebih baik melalui semua jabatan-jabatan di gaji oleh pemerintahan Thailand dan sebagainya.

1. Setiap sekolah Tadika mendapatkan biaya dari pemerintahan. Biaya tersebut mencakupi gaji guru-guru Tadika dan bersangkutan dengan sekolah Tadika itu.
2. Setiap masjid mendapatkan biaya dari pemerintah. Biaya tersebut mencakupi gaji bulanan bagi imam, khotib, bilal dan anggota ahli jawatan kuasa masjid.
3. Member benih binatang dan tanaman salah satu program pemerintah untuk masyarakat dapat berdikari secara mandiri adalah dengan membagikan benih atau bibit binatang dan bibit tanaman. Di antaranya bibit bebek, kambing, sapi. Sementara bibit tanaman, di antaranya bibit kankung, bibit kelapa, sawit dan sebagainya.

⁶⁴Muh. Rasul Kasim, Mahasiswa, Wawancara pribadi, 5 januari 2018

4. Pemerintahan izin mendirikan Bank Islam di Kawasan di Thailand Selatan untuk dapat kemudahan bagi masyarakat Muslim Patani dalam mempermudah Masyarakat muslim Patani menyimpankan dana-dana mereka.
5. Anggaran projek bangunan, dalam kemudahan bagi Masyarakat Muslim Patani seperti dalam membangun toilet dan perpustakaan desa dan lain-lain lagi.

3. Bidang Budaya, kebebasan dalam berbudaya

Pada batas tahun 1932, Siam merubah indentitas politik Monarki absolute menjadi Monarki konstitusional. Pada tahun inilah, dimulai harapan dan impian baru akan perubah nasib orang-orang Melayu Patani menjadi lebih baik, agar pemerintah Siam berpihak dan mendukung hak kemerdekaan bagi Rakyat Patani. Namun, sebaliknya. Siam semakin mengukuh proses integrasinya melalui pendidikan nasional untuk mengartikulasikan kesatuan Thailand, yang bertujuan menyatukan semua etnis, tidak hanya etnis Melayu melainkan juga etnis China dan lainnya yang ada di wilayah Thailand.⁶⁵ Dalam program ini. Pemerintah menetapkan bahwa:

1. Negara memiliki hak untuk mendidik rakyat
2. Negara memiliki otoritas penuh untuk mengontrol dan memantau program pendidikan di pemerintahan dan sekolah swasta.

⁶⁵ Erni Budiwanti, "Forced Cultural and Assimilation and it's Implication for the Continuation Pattani Muslim's Identity" ..., h. 115-116

3. Setiap individu yang telah lulus wajib belajar berarti dia adalah warga Negara yang mampu mendapatkan sumber daya hidup yang penting untuk bekerja, dan dia memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara, juga bisa membuktikan dirinya secara fungsional melalui di luar pekerjaannya.

Menurut fakta sejarah ketika kebijakan perdana menteri yang ke-3 Thailand menghapuskan bahasa Melayu itu melalui sistem pendidikan yaitu di bawah undang-undang pendidikan, semua anak-anak yang sudah cukup umur disekolahkan diwajibkan belajar di sekolah kerajaan dan tidak dibenarkan mengikuti pendidikan di luar sekolah pemerintahan, termasuk pendidikan pondok dan lembaga pengajian Islam.

Sekarang rata-rata pejabat-pejabat di jabatan pemerintahan di Thailand Selatan itu adalah rata-rata orang-orang Melayu patani contohnya lembaga pemerintahan daerah atau Wilayah, lembaga pendidikan, dan sebagainya. di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dari sekolah Melayu *Tadika* dan sekolah dasar pemerintahan hingga Universitas yang belajar bahasa Melayu.

Sejak tahun 1971 M. pemerintahan memberi kuota kepada masyarakat Melayu Islam dalam lima Wilayah Selatan, mengikuti kuliah dalam Universitas 50 orang setahun dan sekolah kepolisian 15 orang

dalam tahun yang sama, pemerintahab menetapkan Islam perguruan tinggi di dalam bangkok untuk menerima Siswa Melayu-Islam.⁶⁶

Pemerintahan Thailand sekarang mendukung setiap kehidupan Masyarakat Melayu Patani dalam semua kegiatan-kegiatan yang barkaitan dengan kebudayaan dan keagamaan

Kegiatan-kegiatan di hari besar Islam (Hari lebaran) kebiasaan Masyarakat Melayu Patani bersepakat mengadakan kegiatan seni-seniman di sekolah Tadika, ada perlembaan anasyid, pidato, pantun, puisi dan sebagainya, dalam hal ini pemerintahan usaha berganbung dalam kegiatan-kegiatan tersebut.

Dalam hal keagamaan pemerintahan mengadakan Program menaikan Haji bagi warga Patani setiap tahun pemerintahan memberikan kouta untuk Masyarakat Patani dapat menunaikan Haji secara gratis. Segala biaya akan ditanggung oleh pemerintah. Namun, tidak semua mendapatkan kouta tersebut, adapun yang akan mendapat kesempatan itu hanya orang sesuai dengan mekanisme atau syarat-syarat yang ditentukan seperti orang miskin.

C. Harapan masyarakat Melayu Patani di masa depan

Setiap manusia merupakan makhluk soaial yang tidak boleh hidup sendirian. Manusia yang baik adalah manusia yang dapat mempereratkan persaudaraannya antara sesame manusia, maka sesama membangun persaudaraan (Ukhuwah).

⁶⁶ Arifin Binji', Abdulklah Lomae, Suhaimi Ismae, *Patani Sejarah Politik dan Alam Melayu*, Jilitk 3, (Hatyai, Songgora).h.330.

1. Ukhuwah Islamiyah, berartinya persaudaraan yang muncul dan berkembang atas dasar agama (islam) sebagaimana firman Allah Swt;

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (Q.S. Al Hujurat ayat 10)

2. Ukhuwah Insaniyah, berartinya persaudaraannya atas dasar sesama manusia, persaudaraan antara sesama umat manusia, berlaku pada sesama manusia secara universal tanpa membedakan agama, suku, ras, dan aspek-aspek kekhususan lainnya. Ukhuwah ini dilandasi bahwa manusia sama-sama makhluk Allah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian dan pembahasan mulai dari bab satu, dua, tiga dan empat, bahwa konflik sosial Patani Thailand Selatan memiliki beragam latar belakang dan penyelesaian, sebagai berikut:

- a. Latar belakang konflik sosial di Patani Thailand Selatan, terutama menjadikan faktornya yaitu;
 1. kehilangan kekuasaan kerajaan Islam Melayu Patani
 2. ketidak keadilan dalam pembagian hasil bumi.
 3. Tidak member keruangan keragaman.
- b. Penyelesaian di Patani sudah ada dalam berbagai bidang konflik, tetapi konfliknya masih berjalan karena solusi yang ada sekarang yang bersifat sementara, yaitu;
 1. Pemerintahan Thailand member hak memerintah wilayah bagi orang Melayu Patani.
 2. Membuka kesempatan untuk pekerjaan.
 3. Kebebasan dalam berbudaya.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah di kemukakan tersebut, maka di bawah ini akan mengajukan sebagai saran yaitu:

1. Peneliti berharap kepada pemerintahan Thailand menyelesaikan Konflik di Thailand Selatan secara cepat dan mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan Rakyat.
2. Peneliti berharap kepada mahasiswa-mahasiswi Patani dan umumnya. menlanjutan karya-karya yang berkaitan dengan konflik di Thailand Selatan yang lebih bagus dan menyampaikan akar-akar permasalahan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fathy Al-Fatani, *pengantar sejarah patani*, (Pustaka Darussalam 1994)
- Ahmad Umar Chapakia, *Politik Masyarakat Islam di Selatan Thailand 1902-2002*, (Malaysia : University Kebangsaan Malaysia UKM, 2002)
- Arifin Binji', Abduklah Lomae, SuhaimiIsmae, *Patan iSejarah Politik dan Alam Melayu*, Jilid 3, (Hatyai, Songgora).
- Bahasa Melayu Patani di Tiga Wilayah Selatan Thai”<http://ummahpatani.blogspot.co.id/2010/10/bahasa-melayu-patani-di-tiga-wilayah.html>.Diakses
- Deborah Hutaeruk, Daniel P. Purba, Margaretha H. Eddy, *Kiat Mengenai Konflik*, Translation Copyright 2006
- Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *SOSIOLOGI TEKS PENGANTAR DAN TERAPAN*, edisi Keempat (Jakarta, 2010)
- Elly M. Setiadi, Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Prenadamedia Group-Jakarta, 2013)
- Hadari Nawawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Jakarta: Gajah Mada University press, 1998)
- Henry Iwansyah, *Segregari Sosial dan Relevansinya dengan Konflik Komunal Berbasis Sara* (Lampung: Percetakan Osa, 2013)
- Herry Nurdi, *Perjuangan Muslim Patani*, (Kuala Lumpur, 2010)
- Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, (Bandung, 2016)
- Jacobus Ranjabar, *sistem sosial budaya indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2013
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset sosial*, (Bandung : Mandur Maju, cet VIII, 1996)
- Kosim Daud Al-Fathoni *Latar Belakang Impayar Melayu Lankasukat* LBH Jakarta, *Sejarah Kelam Thailand Dengan Perjuangan Masyarakat Patani*
- Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, Remadjakarya (Bandung: 1989)
- M. Fikri, *Implementasi Kebijakan Pemerintah* (Jakarta: Universitas Muhammadiyah, 2009)

Mohd.Zamberi A. Malek, *Patani Dalam Tamadun Melayu*, (Dewan Bahasa dan Pustaka kementerian Pendidikan Malaysia Kuala Lumpur 1944).

Nik Anuar Nik Mahmud, *Sejarah Perjuangan Melayu Patani 1785-1954*, (Malaysia, 2006)

Surin Pitsuwan, *Islam di muangthai Nasionalisme Melayu Masyarakat*, Jakarta 1989.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Alfabeta, Bandung, 2015)

Paisal Burlian, *patologi sosial*, Jakarta : Bumi Aksara, 2016

Rusdiana, M.M. "*Manajemen Konflik*" (CV Pustaka Setia 2015)

PAGE, Media Informasi News / BLOGGER, Amanat Penderitaan Rakyat Patani (AMPERA PATANI)".

Turanisia, <http://www.turanisia.com/infografik-genap-14-tahun-konflik-patani-thailand-selatan/>

Wan Yunil Amri bin Wan Yuni Khairi, " Jatuhnya Kerajaan Patani dan Dampak Perubahan pada Kehidupan Masyarakat Melayu Patani", Skripsi, (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH 2017)

Vafi Saefulah, Teknik Wawancara Jurnalistik,

https://www.kompasiana.com/www.vefisaefullah.com/teknik-wawancara-jurnalistik_5528db7bf17e61590d8b4681.

https://id.wikipedia.org/wiki/Plaek_Pibulsonggram.

<https://www.deepsouthwatch.org/node/7536>, Pena Patani, *Mara, Majudan Mundur Dalam Proses Dialog Damai Patani*.

<http://pmi-sumedang.blogspot.co.id/2012/02/sedikit-sejarah-pattani.html>

Condut Balekambang, Jakarta Timur". *Skripsi*, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010

Wikipedia, "Provinsi Patani", https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Pattani.

<http://www.abaddemokrasi.com>

<http://pmi-sumedang.blogspot.co.id/2012/02/sedikit-sejarah-pattani.html>

<https://artikelilmiah.wordpress.com/minoritas-muslim-thailand-selatan/> (15 Jan 2009 15).

PEDOMAN HASIL WAWANCARA

Judul Penelitian : Konflik Sosial Pada Masyarakat Melayu Di Thailand Selatan

Nama saudara/I : Muhammad Fadil Yalawae

Status : Mahasiswa

1. Bagaimana Menurut saudara/i tentang konflik sosial antara masyarakat Melayu Patani dan Pemerintahan Thailand?

Dalam hal konflik antara penduduk Patani atau wilayah perbatasan selatan dengan pemerintah Thailand, saya merasa sangat rumit susah untuk memahami dan memunculkan masalah-masalah yang harus paham bersama tetapi poin utamanya adalah tidak memahami perbedaan dalam sejarah dan juga dalam hal agama dan budaya menjadikan tidak mengerti dalam komunikasi tidak mengerti membawa permasalahan tidak relevan. Bagian pemerintahan juga tidak ada keadilan di bidang pendidikan dan pertanian di tempatan. Menurut saya bagian ini lah menjadi masalah konflik

2. Menurut saudara/i apa yang mebelatar belakangi konflik sosial antara masyarakat Melayu Patani dan pemerintahan Thailand?

latar belakang konflik sosial menurut saya disebabkan oleh berbagai faktor, faktor yang penting konflik di bagian sejarah semenjak dahulu, tidak mengerti dalam bidang sejarah antara dua pihak yaitu masyarakat Patani dan pemerintahan Thailand, faktor berikutnya adalah sejarah sosial budaya dalam kawasan tiga Wilayah Selatan Thailand. Menjadikan tempat multi kulturalisme kebiasaan

menjadi permasalahan, dalam bidang pendidikan pemerintahan kurang membuka kesempatan, kurikulum pendidikan di bawah kekuasaan pemerintahan kalau bentuk pendidikan pondok menjadi pemerintahan mengatakan golongan membebaskan diri. Dalam hal ekonomi di kawasan ini sumber alam pemerintah tidak membuka kesempatan bagi masyarakat setempat dalam menggunakan hasil sumber alam

3. Menurut saudara/i apa saja kebijakan pemerintah Thailand untuk masyarakat Melayu Patani?

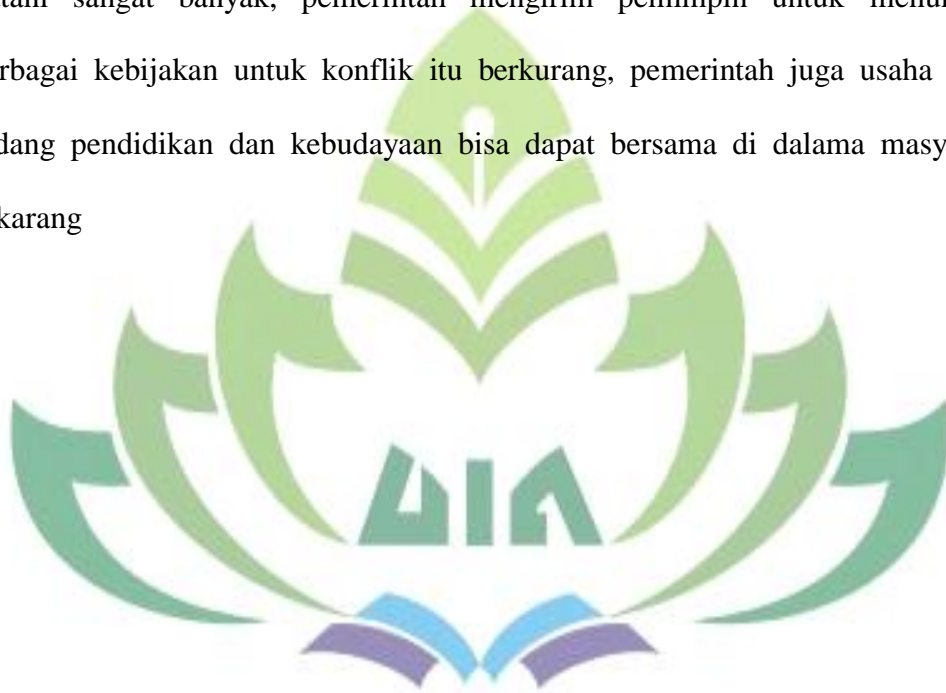
pandangan saya terhadap kebijakan pemerintah terhadap masyarakat entah itu menjadi pusat administrasi di selatan, saya merasa itu adalah hal yang baik menunjukkan pemerintahan usaha dalam menyelesaikan konflik, kebijakan pemerintah itu memang konflik itu berkurang tapi yang sebenarnya menyelesaikan itu tidak betul dengan permasalahan yang terjadi

4. Menurut saudara/i bagaimana bentuk penolakan masyarakat Melayu Patani terhadap kebijakan pemerintahan?

Penolakan masyarakat Patani terhadap pemerintahan Thailand ada semenjak dahulu kala, jejak masyarakat Patani tidak dapat kebebasan dalam kehidupannya harian dalam hal kehidupan beragama masyarakat patani keluar menolak berbagai bentuk, entah keluar untuk berdialog sekarang juga semakin berkurang karena pemerintahan agak sedikit membuka kebebasan. Menurut saya semua masyarakat Patani keluar untuk meminta hak yang sebenarnya, karena memudahkan bagi pemerintahan untuk dalam menyelesaikan masalah tersebut

5. Menurut saudara/i adakah upaya pemerintahan Thailand Usaha dalam menyelesaikan konflik tersebut?

Dalam hal menyelesaikan konflik di Patani pemerintahan sangat usaha dalam menyelesaikannya, entah dalam bidang modal pemerintah menurunkan modal di Patani sangat banyak, pemerintah mengirim pemimpin untuk menunjukan berbagai kebijakan untuk konflik itu berkurang, pemerintah juga usaha dalam bidang pendidikan dan kebudayaan bisa dapat bersama di dalama masyarakat sekarang



PEDOMAN HASIL WAWANCARA

Judul Penelitian : Konflik Sosial Pada Masyarakat Melayu Di Thailand Selatan

Nama saudara/I : Muhammad Soffee waeberahing

Status : Mahasiswa

1. Bagaimana Menurut saudara/i tentang konflik sosial antara masyarakat Melayu Patani dan Pemerintahan Thailand?

Konflik akan lahir ada dua pihak yang tidak mengakui terhadap berapa hal dan ada keuntungan sebaliknya pihak yang mau menguasai jadi konflik terhadap masyarakat melayu patani dengan pemerintah Thai. Kalau menurut pandangan saya. 1. Faktor bahasa dan agama yaitu bahasa salah satu media dalam komunikasi perhariannya untuk masyarakat melayu patani bahasa akan melahirkan konflik sebab bahasa yang pemerintah thailand mau mau syaikat patani menguna bahasa thai. Jadi paksa akan melahirkan konflik Dan Agama adalah keperjayaan. salah satu pemerin thai bermutukutural campur bagai mana untuk masyarakat patani melayu menyalahkan dalam aqidah untuk dalam mengamalkan maka agama salah satu akan membawa konflik. 2. Faktor Sejarah penjahan dalam merampaskan kuasa masyarakat melayu patani . Maka akan melahirkan konflik sebab masyarakat melayu patani akan bangkitkan melawan dalam mengambil kemabali dalam membawa patani sejahtera dan damai asal patani pernah sejahtera dan damai.. 3. Faktor. Keuntungan pemerintah terhadap masyarakat melayu patani sebab sumber alam di patani sangat banyak disitu lah pemerintah thai merampas jadi terhadap

masyarakat melayu patani merasa tidak perikeadilan dalam mengusai oleh perintah thai. Maka konflik akan akan timbul di dua pihak.

2. Menurut saudara/i apa yang mebelatar belakangi konflik sosial antara masyarakat Melayu Patani dan pemerintahan Thailand?

BUMI DIJAJAH HARTA DIRAMPAS RAKYAT DITINDAS sekarang 90% rakyat Patani sudah tahu bahwa bumi patani dijajah oleh kerajaan thai samaan kekuasaan dirampas sekarang rakyat masih belum dapat keadilan contoh tragedi takbai sampai sekarang rakyat masih belum dapat keadilan, setengah rakyat ada yang tidak bisa tinggal sama keluar karena dicari oleh tentera thai sedangkan mereka berkerja keras untuk menuntut hak kebenaran dipatani, dan rakyat ditindas semua sudut, Pendidikan contoh guru tadika ditanggap sama tentera thai sedangkan mereka tanpa kesalahan pelajar-pelajar mau belajar sama siapa??? sedang guru tadika sebagai fondasi pertama untuk memdidik anak melayu yang belajari di sekolah tadika.

3. Menurut saudara/i apa saja kebijakan pemerintah Thailand untuk masyarakat Melayu Patani?

Kalau polusi pemerintah thai terhadap masyarakat patani yaitu kalau kondisi sekarang sangat tidak sesuainya dengan sebab dalam polusi pemerintah thai kasi itu kebanyakan bukan tujuan yang sepenuh hati dari pemerintah untuk meyarikat patani. polusi salah satu alat membawa kedamaian kesejahteraan ke adilan merasa hidup enat dan bahagia. Kalau polusi sekarang yang mendapatkan sangat tidak sesuail masyarakat patani sudah ada masalah

beberapa faktor jadi pemerinta thai sedang memperluaskan masalah oleh karena dengan keutungan bangsa thailand.

4. Menurut saudara/i bagaimana bentuk penolakan masyarakat Melayu Patani terhadap kebijakan pemerintahan?

Menurut saya menjadi hal yang baik karena protes menjadi peran politik yang menjadi hasil dampak pada aturan karena pihak pemerintah sendiri harus menerima, karena pihak pemerintah menggunakan sistem demokrasi dalam memerintah, dalam permintaan hak kembali dalam menghasilkan kebaikandalam permintaan kebijakan yang masyarakat di inginkan melalui bentuk penolakan menurut proses menuntut keadilan

5. Menurut saudara/i adakah upaya pemerintahan Thailand Usaha dalam menyelesaikan konflik tersebut?

Pihak kerajaan usahanya untuk menyelesaikan konflik yg ada ditiga wilayah selatan thai semenjak dari 2004 hingga saat ini, Menurutku tidak ada akhirnya maksudnya Keadilan dan kedamaian tak pernah tercapai baik dibidang ekonomi maupun bidang membangun bangsanya, Oleh kemudian itu umat muslim penduduk Asli yg ada disana semakin hari semakin merasa haus dengan keadilan dan kedamaian yg mereka impikan justru pehok kerajaan hanya memberikan sebuah mimpi busuk yg mengakui negara demokrasi. Seperti Contoh beberapa Hari yg berlaku dalam majlis Rundingan pehok bersenjata dengan pehak kerajaan thai yg sanggup mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan konflik yg berlaku di selatan thai (patani) Tetapi dibalik semua itu pehak kerajaan thai hanya ada perundingan dengan kelompok

tertentu sahaja bahkan pihak BRN tidak sekali-sekali diundang untuk membingcang bersama.

